

PENDAHULUAN



ANTARA GTK PAUD DAN DIKMAS DAN NAWACITA

endidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas) berada pada posisi penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Jika diibaratkan sebuah lingkaran, pendidikan PAUD dan Dikmas berada pada lingkaran terdalam dan terluar. Pada lingkaran terdalam, di sanalah anak-anak usia dini berada. Pendidikan sudah mulai diberikan kepadanya sejak masih berada dalam kandungan sang ibu. Sedangkan pada lingkaran terluar adalah pendidikan masyarakat. Di sanalah masyarakat yang lebih luas, mulai dari anak-anak putus sekolah, remaja pengangguran, orang dewasa, dan kaum lansia yang belum berkesempatan menikmati bangku pendidikan berada. Pendidikan masyarakat berperan melayani masyarakat yang belum tuntas menikmati pendidikan secara formal dalam memenuhi beragam kecakapan hidup hingga menuju liang lahat.

Namun demikian, layanan pendidikan belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Pemerataan akses dan mutu layanan pendidikan juga belum berjalan baik. Termasuk pemerataan guru dan tenaga kependidikan. Beragam permasalahan selalu muncul, dan setiap saat pula pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hadir memecahkan permasalahan tersebut.

Permasalahan yang terjadi pada dunia pendidikan telah terangkum dalam rencana strategis pembangunan pendidikan oleh Kemendikbud. Dalam Renstra Kemendikbud 2015-2019 sebagai berikut: 1) peran pelaku pembangunan pendidikan belum optimal; 2) belum semua penduduk memperoleh layanan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas; 3) pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas belum maksimal; 4) peningkatan kualitas pembelajaran belum maksimal; 5) peningkatan manajemen guru, pendidikan keguruan, dan reformasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) belum sebagaimana yang diharapkan (jumlah dan distribusi guru masih perlu ditata secara lebih baik kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru harus ditingkatkan kurangnya kapasitas LPTK dalam menyediakan guru berkualitas); 6) peningkatan keterampilan kerja dan penguatan pendidikan orang dewasa (pendidikan masyarakat) belum maksimal; 7) pengentasan keniraksaraan belum merata; 8) peningkatan pendidikan keluarga belum seperti yang diharapkan; 9) rendahnya mutu kemahiran membaca dan semakin punahnya penggunaan bahasa dan sastra daerah. "Kesepuluh adalah gejala memudarnya karakter siswa dan jati diri bangsa, dan kesebelas adalah pemanfaatan anggaran pendidikan belum efektif dan efisien; dan 12) belum optimalnya tata kelola organisasi Kemendikbud," ujar Prof. Dr. Muhadjir Effendy MAP, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada lingkup PAUD dan Dikmas, peserta didik/warga belajar yang menjadi target binaan GTK PAUD dan Dikmas juga tersebar cukup luas, dari pusat perkotaan hingga pelosok desa. Belum lagi pada wilayah-wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal, hingga wilayah rawan bencana ekonomi dan sosial. Kiprah GTK PAUD dan Dikmas dalam menjalankan tugas dilakukan dengan menyisir lapisan masyarakat yang tak tersentuh pendidikan formal dikarenakan berbagai hal.



Hal ini menjadikan profesi GTK PAUD dan Dikmas tidak dipandang masyarakat, ibarat profesi yang tidak tersentuh. Bukan lantaran sulit dan megahnya profesi tersebut, melainkan karena kurang menarik dan menjanjikan secara ekonomi. Alhasil, masyarakat tidak begitu antusias mengabdikan diri sebagai GTK PAUD dan Dikmas. Para orangtua pun tidak menempatkan profesi GTK PAUD dan Dikmas sebagai pilihan anak-anaknya. Profesi GTK PAUD dan Dikmas kebanyakan hanyalah sebuah pelarian dan keterpaksaan. Hanya sedikit yang benar-benar tulus mengabdikan diri untuk PAUD dan Dikmas dengan berbagai persiapan.

Banyak GTK pada lembaga PAUD hanya bermodal ijazah SMA, bahkan ada yang hanya berijazah SMP. Modal yang digunakan untuk mengawal anak usia dini hanyalah kepedulian, keteladanan, dan kesabaran. Pun demikian pada lembaga-lembaga pendidikan masyarakat masih banyak GTK yang mengabdi di sana masih setengah hati. Pengabdian pada lembaga pendidikan masyarakat hanya menjadi pekerjaan sampingan. "Selain itu, lembaga PAUD dan Dikmas kelahirannya banyak diinisiasi masyarakat juga kerap mengalami pasang surut bahkan mati tanpa jejak. Terutama lembaga-lembaga yang dana operasionalnya mengandalkan dan menggantungkan dari subsidi pemerintah/pihak lain," kata Hamid Muhammad, Ph.D, Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Kemendikbud.



Peningkatan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai standar bagi GTK PAUD dan Dikmas menjadi perhatian serius pemerintah. Elemen-elemen pembangunan di Indonesia disadarkan, bahwa pembangunan harus dimulai dari pinggiran. Hal ini sebagaimana tertuang dalam intruksi presiden RI Jokowidodo tentang Nawa Cita. Dalam Nawa Cita tersebut meliputi: 1) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; 2) membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; 3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4) memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 5) meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; 6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; 7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; 8) melakukan revolusi karakter bangsa; dan 9) memperteguh restorasi sosial Indonesia.











Hamid Muhammad, Ph.D ,

Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan
(Dirjen GTK), Kemendikbud.

MENYIAPKAN GTK PAUD DAN DIKMAS ERA GLOBLALISASI

Pada kondisi kekinian, modal pengabdian, keteladanan dan kesabaran sebagai GTK PAUD dan Dikmas tidaklah cukup. Masih diperlukan kekuatan kompetensi, baik penguasaan materi dan IT, cara mengelola lembaga dan cara mengajar yang efektif dan efisien, serta kekuatan mental untuk bersaing secara profesional. "Apalagi saat ini, GTK PAUD dan Dikmas dihadapkan pada tantangan perkembangan zaman yang begitu pesat. Arus teknologi informasi yang menjadi bagian dari globalisasi dunia merasuk pada setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat, dari perkotaan hingga pelosok, dari anak-anak hingga usia lansia. Globlalisasi mampu meluluh lantakkan berbagai aturan, norma, bahkan adat istiadat yang telah lama berlaku di masyarakat," kata Hamid.

Globalisasi dipahami sebagai proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. "Dalam era keterbukaan dunia yang semakin nyata, globalisasi beserta arus yang menyertainya tidak sepenuhnya dinggap buruk. Banyak sisi baik yang bisa digali dengan kesiapan matang. Inilah yang menuntut GTK PAUD dan Dikmas untuk andil dan berperan aktif menyambut dan menyikapi secara bijak era globalisasi," kata Hamid.

Tantangan terdekat adalah bagaimana GTK PAUD dan Dikmas mampu menyiapkan anak didik/warga belajar benar-benar siap menghadapi abad 21. Abad 21 merupakan awal milenium ketiga dalam sejarah umat manusia. Pada milenium ini dunia melakukan banyak perubahan kebijakan hubungan antar negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap negara menyadari akan kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. Ada negara yang begitu kuat di salah satu sektor, namun lemah pada sektor lainnya. Kondisi demikain menyebabkan negara-negara berada dalam kondisi saling membutuhkan satu sama lain, khususnya untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya. Tindakan yang dilakukan tiap negara termasuk Indonesia adalah dengan mengikuti forum-forum dunia, yang salah satunya adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang ditandatangani tahun 2003.

Dari kacamata tersebut dapat dilihat, bahwa pendidikan sangatlah penting, dan kondisi pendidikan di Indonesia bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Banyak hasil penelitian dari lembaga-lembaga asing yang menempatkan kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal. Keterpurukan ini tentu tidak lantas membuat warga Indonesia berciut nyali untuk menghadapi persaingan.

Guru masa kini menjadi isu yang menyeruak sebagai bagian dari diterapkannya Kurikulum 2013. Guru masa kini adalah guru sebagaimana diamanatkan dalam Kurikulum 2013 agar memiliki kemampuan mengantarkan peserta didik/warga belajar dapat meraih kecakapan abad 21. "Untuk itulah, GTK PAUD dan Dikmas harus membekali diri dengan kompetensi 4C yang meliputi *Communication* (komunikasi), *Collaborative* (kolaborasi), *Critical Thinking and Problem Solving* (berpikir kritis dan memecahkan masalah), serta *Creativity and Innovation* (Kreativitas dan inovasi),' ujar Dr. Abdoellah, M.Pd, Direktur PGTK PAUD dan Dikmas.

Communication/komunikasi adalah sebuah kegiatan mentransfer sebuah informasi baik secara lisan maupun tulisan. Namun, tidak semua orang mampu melakukan komunikasi dengan baik. Terkadang ada orang yang mampu menyampaikan semua informasi secara lisan tetapi tidak mampu secara tulisan ataupun sebaliknya. Komunikasi efektif terjadi apabila sesuatu (pesan) yang diberitahukan diterima dengan baik dan tidak terjadi salah persepsi.

Collaborative (kolaborasi) merupakan kemampuan berkolaborasi atau bekerja sama, saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggungjawab. Mampu bekerja secara produktif dengan yang lain, menempatkan empati pada tempatnya, menghormati perspektif yang berbeda bukan memaksakan kehendak sendiri. Kolaborasi juga memiliki arti mampu menjalankan tanggung jawab pribadi dan fleksibilitas secara pribadi, pada tempat kerja dan hubungan masyarakat, menetapkan dan mencapai standar dan tujuan yang tinggi untuk diri sendiri dan orang lain, serta memaklumi kerancuan.

Critical thinking and Problem Solving (berpikir kritis dan pemecahan masalah adalah kemampuan untuk memahami sebuah masalah yang rumit, mengoneksikan informasi satu dengan informasi lain sehingga muncul berbagai perspektif, dan menemukan solusi dari suatu permasalahan. Sedangkan Creativity and Innovation (Kreativitas dan inovasi) adalah kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain. Dibutuhkan sikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda. Kreativitas juga didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam menciptakan penggabungan baru. Kreativitas sangat tergantung kepada pemikiran kreatif seseorang, yakni proses akal budi seseorang dalam menciptakan gagasan baru. Kreativitas yang bisa menghasilkan penemuan-penemuan baru disebut sebagai inovasi.





Mengawal tumbuh kembang anak salah satunya dengan melatih menari. Dok. Tksedayu.budimulia.com



PESAN KI HADHJAR DEWANTARA

Bapak pendidikan Indonesia juga pernah menuliskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, seorang guru harus berada di depan, tengah, dan belakang. Jika berada di depan seorang guru harus mampu menjadi teladan, berada di tengah seorang guru harus mampu menciptakan prakarsa dan ide, dan berada di belakang seorang guru harus mampu memberi dorongan dan arahan.

Dari tiga peran guru tersebut dapat diterjemahkan, bahwa seorang guru harus mampu menjadi katalisator, penghubung, penjaga wagang, fasilitator, dan menjadi pengajar. Sebagai *katalisator*, seorang guru harus mampu mengidentifikasi, menggali dan mengoptimalkan potensi anak didik/warga belajarnya. Sebagai *penghubung*, dalam hal ini seorang guru harus mampu menghubungkan anak didik/warga belajarnya dengan sumber-sumber belajar yang beragam. Guru harus bisa mengeksplorasi beragam sumber belajar dari internet dan sumber belajar-sumber belajar lainnya.

Sebagai fasilitator, guru harus membantu proses pembelajaran anak didik/warga belajarnya, seorang guru harus menjadi teman diskusi dan bertukar pikiran. Guru sebagai penjaga gawang, dalam hal ini seorang guru harus mampu membantu anak didik/warga belajarnya menyaring pengaruh negatif. Contoh pengaruh negatif yang kerap terjadi di masyarakat antara lain, narkoba, pergaulan bebas, bulliyng, anarkisme, pornografi, radikalisme, tawuran antar kelompok masyarakat, dan lain sebagainya.

Peran guru selanjutnya adalah sebagai *pengajar*, guru harus menyampaikan materi dengan cara tepat dan menyenangkan agar bisa dimengerti dan dipahami anak didik/warga belajarnya dalam suasana yang nyaman.

SASARAN PEMBINAAN

Aktor yang memegang peranan cukup penting dalam pertumbuhan PAUD dan Dikmas yang berkualitas di masyarakat adalah guru dan tenaga kependidikan (GTK). GTK PAUD dan Dikmas sedikit berbeda dengan GTK pada satuan pendidikan formal. Keberadaan Undang-Undang Guru dan Dosen yang lahir pada tahun 2005 belum mampu mengayomi seluruh jenis GTK PAUD dan Dikmas. Sementara jenis GTK PAUD dan Dikmas sangat beragam. Selain GTK yang mengabdi pada lembaga-lembaga PAUD, ada pula pamong belajar (PB) pada unit pelaksana tugas (UPT) di kabupaten/kota dan provinsi, penilik, kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), pengelola lembaga-lembaga pendidikan masyarakat seperti Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), serta instruktur kursus dari beragam jenis Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). Beberapa jenis GTK PAUD dan Dikmas lain yang juga menjadi sasaran pembinaan antara lain, Penguji GTK PAUD dan Dikmas, Asesor PAUD dan PNF, serta Penguji PTK Kursus dan Pelatihan, serta tutor pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan.

SASARAN PEMBINAAN GURU DAN TENDIK PAUD DAN DIKMAS

GURU DAN PENDIDIK LAINNYA

- 1. Guru TK
- 2. Guru KB/TPA/SPS
- 3. Pamong Belajar
- 4. Tutor Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C
- 5. Tutor Pendidikan Keaksaraan
- 6. Instruktur Kursus dan Pelatihan
- 7. Penguji Kompetensi GTK PAUD
- 8. Penguji PTK Kursus dan Pelatihan
- 9. Asesor PAUD dan PNF

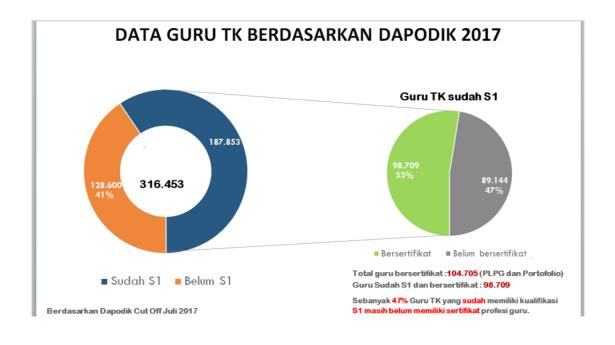
TENAGA KEPENDIDIKAN

- 1. Kepala TK
- 2. Pengawas TK
- 3. Pengelola KB/TPA/SPS
- 4. Penilik PAUD/Kesetaraan & Keaksaraan/Kursus
- 5. Pengelola Kejar Paket A, B, dan C
- 6. Pengelola Kejar Keaksaraan
- 7. Pengelola Kursus dan Pelatihan
- 8. Pengelola PKBM
- 9. Pengelola TBM

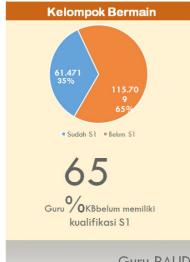
Keterangan tabel:

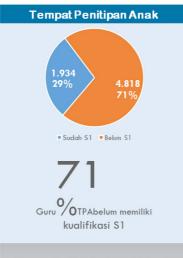
jenis GTK PAUD dan Dikmas yang menjadi sasaran pembinaan Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas

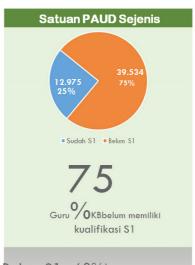
Berikut ini data sebaran berbagai jenis GTK PAUD dan Dikmas tahun 2017.



DATA GURU PAUD NON FORMAL NASIONAL







Guru PAUD Non Formal: 236.441 (S1: 32%, Belum S1: 68%)

Berdasarkan Dapodik Cut Off Desember 2016

REKAP DATA GTK KURSUS

Jumlah Instruktur Kursus 47. 348 Org

Jumlah Pengelola Kursus 19.829 Org

Jumlah Penguji Kursus 1.644 Org

No	Nama Propinsi	Jumlah Program Kursus	Jumlah Instruktur Kursus	Jumlah Pengelola Kursus	Jumlah Penguji Kursus
1	DKI Jakarta	1.195	1.576	839	258
2	Jawa Barat	4.147	7.203	2781	345
3	Jawa Tengah	3.370	5.817	2220	192
4	DI Yogyakarta	467	1.171	316	74
5	Jawa Timur	4.444	8.144	3142	213
6	Aceh	648	860	382	7
7	Sumatera Utara	2.158	2.781	1742	58
8	Sumatera Barat	629	1.222	363	24
9	Riau	444	835	342	18
10	Jambi	508	696	411	15
11	Sumatera Selatan	888	1.609	598	21
12	Lampung	957	1.505	645	33
13	Kalimantan Barat	360	563	272	12
14	Kalimantan Tengah	238	474	157	5
15	Kalimantan Selatan	514	943	340	14
16	Kalimantan Timur	592	1.078	331	40
17	Sulawesi Utara	553	572	279	26
18	Sulawesi Tengah	575	890	409	7
19	Sulawesi Selatan	910	1.300	588	58
20	Sulawesi Tenggara	384	514	212	1
21	Maluku	157	224	106	3
22	Bali	867	1.239	563	67
23	Nusa Tenggara Barat	787	1.253	531	9
24	Nusa Tenggara Timur	543	691	458	17
25	Papua	67	101	55	2
26	Bengkulu	424	546	276	5
27	Maluku Utara	207	218	144	3
28	Banten	954	1.459	479	89
29	Bangka Belitung	187	321	157	7
30	Gorontalo	186	222	117	11
31	Papua Barat	53	66	28	0
32	Kepulauan Riau	550	766	333	8
33	Sulawesi Barat	271	442	184	2
34	Kalimantan Utara	49	47	29	0
	JUMLAH	29.283	47.348	19.829	1.644

Sumber: www.infokursus.net_pertanggal 30 Januari 2018

REKAP DATA TUTOR KESETARAAN

Jumlah Tutor Kesetaraan di PKBM 20.553 org

Jumlah Tutor Pendidikan Kesetaraan di SKB 552 Org

No	PROVINSI	TUTOR KES	TUTOR TOTAL			
140	PROVINSI	PKBM	SKB	TOTOR TOTAL		
1	Prop. Aceh	289	11	306		
2	Prop. Bali	253	7	260		
3	Prop. Bangka Belitung	195	5	200		
4	Prop. Banten	1.122	-	1.124		
5	Prop. Bengkulu	208	-	208		
6	Prop. D.I. Yogyakarta	375	16	395		
7	Prop. D.K.I. Jakarta	645	-	645		
8	Prop. Gorontalo	181	9	190		
9	Prop. Jambi	535	-	536		
10	Prop. Jawa Barat	4.055	33	4.116		
11	Prop. Jawa Tengah	2.237	82	2.344		
12	Prop. Jawa Timur	2.969	28	3.035		
13	Prop. Kalimantan Barat	192	-	192		
14	Prop. Kalimantan Selatan	766	2	769		
15	Prop. Kalimantan Tengah	221	7	233		
16	Prop. Kalimantan Timur	185	47	232		
17	Prop. Kalimantan Utara	168	-	169		
18	Prop. Kepulauan Riau	267	10	277		
19	Prop. Lampung	469	10	495		
20	Prop. Maluku	97	50	147		
	Grand Total	20.553	552	21.275		

■ Lanjutan

No	Provinsi	TUTOR KESE	Tutor Total	
140		PKBM	SKB	Tolor Tolai
21	Prop. Maluku Utara	148	-	148
22	Prop. Nusa Tenggara Barat	466		476
23	Prop. Nusa Tenggara Timur	388	57	446
24	Prop. Papua	178	•	178
25	Prop. Papua Barat	84		84
26	Prop. Riau	448	19	467
27	Prop. Sulawesi Barat	182	8	190
28	Prop. Sulawesi Selatan	<i>7</i> 35	42	777
29	Prop. Sulawesi Tengah	220	12	232
30	Prop. Sulawesi Tenggara	372	-	372
31	Prop. Sulawesi Utara	129	23	152
32	Prop. Sumatera Barat	349	40	396
33	Prop. Sumatera Selatan	673	14	691
34	Prop. Sumatera Utara	752	20	793



PRIORITAS PEMBINAAN GTK PAUD DAN DIKMAS

Keberadaan jenis GTK PAUD dan Dikmas di Indonesia sangat beragam. Sebarannya pun teramat luas, dari perkotaan hingga wilayah pedesaan yang sulit dijangkau. Fokus pembinaan kepada GTK PAUD dan Dikmas menekankan pada tiga hal, yakni peningkatan kualifikasi dan kompetensi, pengembangan karier serta pemberian kesejahteraan dan penghargaan.

Masalah yang terus menggelayuti dunia pendidikan di Indonesia adalah kualifikasi GTK PAUD dan Dikmas khususnya Guru PAUD Nonformal yang masih rendah. Masih banyak yang berijazah SMA, bahkan SMP. Untuk kelompok ini berdasar data Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas tercatat sebanyak 312.000 orang (ijazah SMP dan SMA). Sementara yang sudah diberikan diklat berjenjang hingga tahun 2017 sebanyak 125.906 orang, berarti masih terdapat sekitar 187.000 orang yang belum tersentuh. "Ini menjadi pekerjaan kita yang harus dituntaskan, saya harapkan selambat-lambatnya sampai akhir 2019 untuk diberikan Diklat guru PAUD tersebut," ujar Abdoellah, Direktur PGTK PAUD dan Dikmas.



Abdoellah melanjutkan bahwa untuk meningkatkan kompetensi guru-guru PAUD tersebut tidak mungkin bisa dilakukan jika hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat (APBN). "Oleh karena itu kepada seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kab/Kota, UPT PAUD dan Dikmas, serta masyarakat baik masyarakat luas maupun yang terhimpun dalam organisasi pendidik PAUD untuk turut serta dalam melakukan pembinaan guru PAUD ini," harap Abdoellah.

Demikian pula dengan guru atau instruktur kursus dan pelatihan harus senantiasa ditingkatkan kompetensinya, lanjutnya. Mengingat sesuai Instruksi Presiden No. 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kemendikbud mengambil kebijakan memperluas cakupan Inpres itu menjadi Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan. "Ini menjadi konsekuensi logis bahwa kita saat ini sudah masuk pada era MEA yang menuntut tersedianya SDM yang terampil dan profesional untuk memenangkan persaingan global yang semakin ketat dan tajam," ujarnya.

Abdoellah menegaskan, Pembinaan terhadap para tutor, baik tutor keaksaraan dan kesetaraan paket A, B, dan C, terutama dalam hal peningkatan kompetensi juga harus ditingkatkan dan digalakkan. "Jangan sampai terhenti, kenapa? Karena jumlah masyarakat yang masih buta huruf masih sekitar 5 juta lebih. Ini kondisi nyata yang harus digarap untuk meningkatkan indeks pendidikan warga Indonesia," katanya.

Demikian pula dengan tutor kesetaraan yang harus terus dipacu karena jumlah warga belajar yang *drop out* masih cukup besar. Tutor paket A, B, maupun C harus terus mendapat perhatian. "Tetapi pendidikan kepada mereka yang diberikan jangan seratus persen sama dengan anakanak sekolah reguler. Harus memberikan bobot keterampilan juga karena mereka butuh keterampilan untuk bekerja," katanya.

Oleh karena itu, Abdoellah sangat berharap kepada seluruh dinas pendidikan kabupaten/kota, UPT, dan segenap organisasi kemasyarakatan yang relevan untuk bergandengan tangan melakukan pembinaan secara sungguh-sungguh, sitematif, efektifan efisien.

Demikian juga dengan Penilik dan Pamong Belajar agar senantiasa mendapat pembinaan baik berkaitan dengan peningkatan kompetensi dan karirnya. Diharapkan mereka betul-betul dapat melakukan fungsinya dalam melakukan pembinaan terhadap satuan dan program pendidik anak usia dini dan pendidik masyarakat.

Untuk pemberian penghargaan melalui Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas, sudah dimulai sejak tahun 2007 serta guru Berprestasi dan guru Berdedikasi yang dimulai tahun 2015 akan terus dilanjutkan. Sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pembinaan GTK PAUD dan Dikmas oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota maka seleksinya tidak lagi berbasis provinsi. Tahun 2017 lalu hal ini sudah berjalan baik, diharapkan tahun 2018 ini keterlibatan dinas pendidikan kabupaten/kota menjadi lebih baik lagi. Tetapi untuk nominasi yang maju ke tingkat nasional tetap berbasis provinsi. •



PROGRAM SUBDIREKTORAT PENILAIAN KINERJA DAN PENGEMBANGAN KARIR



Subdirektorat Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karir mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, penilaian kinerja, dan pengembangan karir guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Subdirektorat Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karir menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian kinerja dan pengembangan karir guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- penyusunan bahan penilaian kinerja guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- penyusunan bahan pengembangan karir guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian kinerja dan pengembangan karir guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian kinerja dan pengembangan karir guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
- pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang penilaian kinerja dan pengembangan karir guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Subdirektorat Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karir dibantu dua seksi, yakni Seksi Penilaian Kinerja dan Seksi Pengembangan Karir.



STRATEGI PEMBINAAN MELALUI PENILAIAN KINERJA DAN PENGEMBANGAN KARIR

Pembinaan terhadap GTK PAUD dan Dikmas yang dilakukan oleh Subdirektorat Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karir menititkberatkan pada Indeks Kinerja Guru (IKG).

IKG diperhitungkan dari hasil proses pendidikan, khususnya hasil belajar peserta didik. Juga diperhitungkan dari hasil uji kompetensi seorang guru serta penilaian kinerja guru (PKG). Antara hasil uji kompetensi dengan PKG memiliki hubungan sangat terkait. Karena PKG diterapkan mengacu pada hasil nilai Uji Kompetensi GTK PAUD dan Dikmas yang belum sepenuhnya menggembirakan. Sehingga PKG mendorong kinerja GTK PAUD dan Dikmas agar lebih profesional dan kompeten sesuai yang diharapkan. Kompetensi seorang GTK PAUD dan Dikmas berimbas pada peningkatan karir/kepangkatan kepegawaiannya.

Mengenai PKG, menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 Tahun 2009, Penilaian Kinerja Guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari kemampuan seorang guru dalam penguasaan pengetahuan, penerapan pengetahuan dan keterampilan, sebagai kompetensi yang dibutuhkan sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

"Penguasaan kompetensi dan penerapan pengetahuan serta keterampilan guru, sangat menentukan tercapainya kualitas proses pembelajaran atau pembimbingan peserta didik, dan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan bagi sekolah/madrasah, khususnya bagi guru dengan tugas tambahan tersebut. Sistem PKG adalah sistem penilaian yang dirancang untuk mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya melalui pengukuran penguasaan kompetensi yang ditunjukkan dalam unjuk kerjanya," jelas Ir. Komaruddin, Kasubdit Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karir.

Secara umum, PKG memiliki 2 fungsi utama yakni sebagai berikut:

- 1. Untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Dengan demikian, profil kinerja guru sebagai gambaran kekuatan dan kelemahan guru akan teridentifikasi dan dimaknai sebagai analisis kebutuhan atau audit keterampilan untuk setiap guru, yang dapat dipergunakan sebagai basis untuk merencanakan PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan).
- 2. Untuk menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, bimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang dilakukannya pada tahun tersebut. Kegiatan penilaian kinerja dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari proses pengembangan karir dan promosi guru untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsionalnya.

Hasil PKG diharapkan dapat bermanfaat untuk menentukan berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan mutu dan kinerja guru sebagai ujung tombak pelaksanaan proses pendidikan dalam menciptakan insan yang cerdas, komprehensif, dan berdaya saing tinggi. PKG merupakan acuan bagi sekolah/madrasah untuk menetapkan pengembangan karir dan promosi guru. Bagi guru, PK Guru merupakan pedoman untuk mengetahui unsur-unsur kinerja yang dinilai dan merupakan sarana untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan individu dalam rangka memperbaiki kualitas kinerjanya.

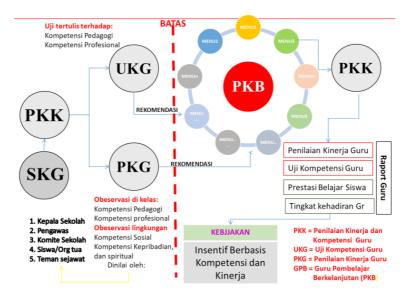
Penilaian mempunyai banyak manfaat karena dapat dipergunakan sebagai alat dalam pengambilan keputusan. Antara lain, penyesuaian-penyesuaian kompensasi, perbaikan kinerja, kebutuhan latihan dan pengembangan, pengambilan keputusan dalam hal penempatan promosi, mutasi, pemecatan, pemberhentian dan perencanaan tenaga kerja, untuk kepentingan penelitian kepegawaian, serta membantu diagnosis terhadap kesalahan desain pegawai.

Dalam rencana strategis Ditjen GTK, ditargetkan profesionalitas yang tercermin dalam IKG seorang guru terus meningkat dengan target capaian tahun 2019 sebesar 100%. Target capaian IKG dapat dilihat dari kemampuan seorang guru mencapai predikat indeks kinerja minimal baik. Berikut ini peta jalan dari tahun 2015 hingga tahun 2019 tentang target capaian IKG.



Peta jalan yang menunjukkan seorang guru harus mampu berkinerja minimal baik yang ditunjukkan dengan capaian memperoleh predikat IKG 100% pada tahun 2019. Sumber Subdit PKPK Dit. PGTK PAUD dan Dikmas

Bagaimana tata kelola IKG dalam penerapannya, lebih rinci sebagaimana bisa dilihat dalam bagan berikut ini.



Tata kelola Indeks Kinerja Guru. sumber Subdit PKPK Dit. PGTK PAUD dan Dikmas.

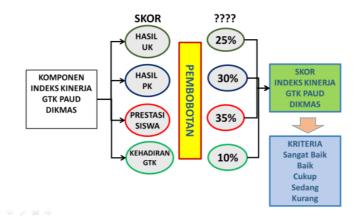
Sedangkan konsep penilaian IKG didasarkan pada empat komponen yang meliputi standar kompetensi (SK) pendidik, penilaian kinerja dan kompetensi pendidik (PKK), uji kompetensi pendidik (UK), dan penilaian kinerja pendidik (PK). Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini



Terdapat empat komponen utama dalam penentuan IKG seorang guru, meliputi SK, PKK, UK, dan PK. Sumber: Subdit PKPK Dit. PGTK PAUD dan Dikmas

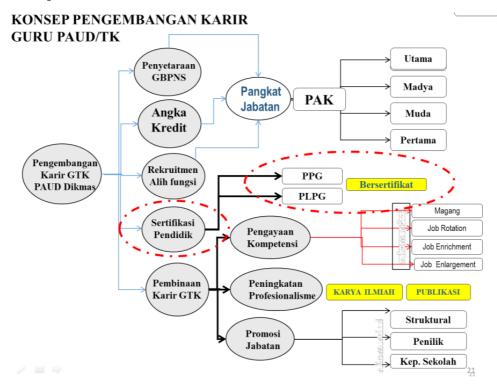
sedangkan pembototan pada tiap komponen terlihat sebagaimana bagan berikut ini.

PEMBOBOTAN PERHITUNGAN INDEKS KINERJA GTK PAUD DIKMAS



Pembobotan empat komponen dalam IKG. Sumber Subdit PKPK Dit. PGTK PAUD dan Dikmas

Pembinaan terhadap GTK PAUD dan Dikmas selain melalui IKG terdapat pola pembinaan melalui pengembangan karier. Penjelasannya dapat dilihat dalam bagan berikut ini.



Konsep pengembangan karier GTK PAUD dan Dikmas. Sumber Subdit PKPK Dit. PGTK PAUD dan Dikmas

CAPAIAN PROGRAM PENILAIAN KINERJA DAN Pengembangan Karier Tahun 2017

Pembinaan yang dilakukan Subdit Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karir pada tahun 2017 selain mengacu pada tugas dan fungsinya juga mengacu pada keterlaksanaan program prioritas Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas (Dit. PGTK PAUD dan Dikmas). Oleh karena itu, pada tahun 2017 lalu, di Subdit PKPK ini masih melaksanakan kegiatan sertifikasi dan peningkatan kompetensi. Tetapi sejak tahun 2018, kegiatan-kegiatan ini dialihkan kepada Subdit Perencanaan Kebutuhan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi (Subdit PK PKK).

Tahun 2017, Subdit PK PK telah merancang sejumlah program strategis, antara lain, penyusunan NSPK mengenai penilaian kinerja dan pengembangan karir serta bimbingan teknis, penyaluran bantuan pemerintah (bapem) untuk sertifikasi guru, pelaksanaan uji kompetensi untuk Pamong Belajar (PB), Penilik serta Instruktur dan Pengelola Kursus, penilaian angka kredit untuk penyetaraan (impassing) untuk Guru Bukan PNS TK (GBPNS TK), penilaian kinerja guru, penilaian angka kredit (AK) guru TK, pengawas, penilik dan pamong belajar. Selengkapnya dapat dilihat dalam gambar berikut ini.



Program prioritas Subdit PKPK Dit. PGTK PAUD dan Dikmas tahun 2017.

Hasil dari keterlaksanaan program tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

SUBDIT PENILAIAN KINERJA DAN PENGEMBANGAN KARIR											
ГАН	UN	2018									
	L										
No	,	Jenis PTK	Tahun 2015		Tahun 2016			Tahun 2017			
140	_	Jeilis FTK	Und.	Hadir	Rata-rata	Und.	Hadir	Rata-rata	Und.	Hadir	KET
					REGI	JLFR			KENA		
1		KAPITULASI HASIL UJI KOMPETENSI							JABATAN		
	а	Penilik	6.034	5.672	38,30	855	625	43,82	954	418	
	b	Pamong Belajar	2.815	2.646	40,35	320	271	46,06	700	240	
		Jumlah	8.849	8.318		1.175	896		1.654	658	
2	DE	KAPITULASI HASIL UJI KOMPETENSI INPASSIN	ıc								
2		Penilik Penilik							80	76	
	-	Pamong Belajar							43	30	
	١	Jumlah							123	106	
		Julilali							123	100	
Jenis PTK		Tahun 2014 - 2015		Tahun 2016		Tahun 201		7			
		Jenis PTK	Usuan	Lolos	PAK & SK	Usulan	Lolos	PAK & SK	Usulan	Lolos	PAK & S
3	RE	KAPITULASI PENYETARAAN GURU K BUKAN F	PNS								
		C TVD 1 DVC	54.005	27.400			5 405	45.420			0.70
	-	Guru TK Bukan PNS	51.865	27.488		10.414	5.196	15.128			9.72

Total Inpassing Ujikom = 500 Pamong Belajar = 30 Org Penilik = 76 Org Jumlah 106 Org - 500 Org = 394 Org PB = 118 Org, dan Penilik 276 Org Jumlah Ujikom Reguler = 9.214 Org Pamong Belajar = 2.917 Org Penilik = 6.297 Org Jumlah Kenaikan jabatan yg sudah = 658 Org, PB = 240, dan Penilik = 418 Org Terbit PAK dan SK = 24.855 Berkas

REKAP PESERTA SERTIFIKASI BERDASARKAN JENJANG DAN STATUS KEPEGAWAIAN TAHUN 2017

JENJANG	NON PNS	PNS	Grand Total
Taman Kanak Kanak	5.702	943	6.645
Sekolah Dasar	2.195	23.439	25.634
Sekolah Menengah Pertama	1.779	7.697	9.476
Sekolah Menengah Atas	921	5.116	6.037
Sekolah Menengah Kejuruan	1.842	7.318	9.160
Sekolah Luar Biasa	95	156	251
Grand Total	12.534	44.669	57.203

Tahun ini pelaksanaan untuk sertifikasi guru TK sebanyak 282 Orang, jika total guru TK berjumlah 6.645 Orang

Rekapitulasi hasil sertifikasi berdasarkan jenjang. Sumber Subdit PKPK Dit. PGTK PAUD dan Dikmas

Sedangkan tingkat kelulusan guru TK dalam mengikuti sertifikasi tahun 2017 sebanyak 282 guru TK dinyatakan lulus dan sebanyak 500 guru TK dinyatakan belum lulus.

Selain itu, subdit PKPK pada tahun 2017 juga telah menerbitkan SK penyetaraan bagi guru bukan PNS dengan hasil sebagai berikut.

PROSES PENERBITAN SK PENYETARAAN GURU BUKAN PNS TK 2017

❖Lembar PAK tercetak = 24.201 lembar

❖Pengajuan penerbitan SK = 24.201 berkas,

dengan rincian sbb:

➤SK terbit = 13.694 berkas

➤SK dalam proses = 10.507 berkas

Penerbitan SK bagi guru bukan PNS yang mengikuti program penyetaraan tahun 2017. Sumber Subdit PKPK Dit. PGTK PAUD dan Dikmas.

Sedangkan bagi Pamong Belajar dan Penilik tahun 2017 juga telah disertakan dalam pelaksanaan diklat fungsional dengan hasil sebagai berikut.

REKAPITULASI DATA YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT/BIMTEK FUNGSIONAL DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT

No	JENIS PTK	Tahun	2015	Tahun	2016	Tahun	2017	KETERANGAN
		Undan gan	Hadir	Undan gan	Hadir	Undan gan	Hadir	
	Telah mengikuti Diklat/Bimtek Fungsional							
1	Pamong Belajar	90	88	40	40	110	105	
2	Penilik	120	120	40	40	150	146	
	Jumlah	220	208	80	80	260	151	
	Telah mengikuti Diklat/Bimtek CTPAK							
1	Pamong Belajar	40	40			120	118	
2	Penilik	40	40			120	114	
	Jumlah	80	80			240	232	

Rekapitulasi hasil diklat pamong belajar dan penilik tahun 2017. Sumber Subdit PKPK Dit. PGTK PAUD dan Dikmas

Subdit PKPK juga melaksanakan program prioritas direktorat, yakni pemberian pengakuan terhadap tutor pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan. "Pengakuan terhadap profesi sebagai Tutor Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan dibuktikan dengan dimilikinya sertifikasi tanda lulus diklat teknis yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (lembaga pemerintah dan atau asosiasi profesi)," ujar Komaruddin.

Dalam hal ini, maka seorang tutor harus memiliki standar sesuai yang telah ditentukan. Beberapa ketentuan yang telah distandarkan harus dimiliki seorang tutor antara lain, memiliki Kompetensi Pedagogik yang baik, memiliki kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang baik dan terus meningkat. Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial bersifat generik. "Artinya untuk semua jenis tutor harus memiliki cakupan kompetensi ini. Sedangkan untuk kompetensi profesional memiliki karakteristik kompetensi yang berbeda antara jenis tutor yang satu dengan lainnya," lanjut Komaruddin.

Seorang tutor dapat dikatakan baik dan profesional, jika telah memenuhi salah satu persyaratan yakni kualifikasi. Berikut ini standar kualifikasi seorang tutor paket A, B, dan C.



Kualifikasi Akademik Tutor Paket A. Tutor pada Pendidikan Kesetaraan Paket A memiliki kualifikasi akademik minimum Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV) dalam bidang pendidikan guru sekolah dasar (PGSD) atau pendidikan bidang studi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

Kualifikasi Akademik Tutor Paket B. Tutor pada Pendidikan Kesetaraan Paket B memiliki kualifikasi akademik minimum Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV) pendidikan bidang studi atau Sarjana bidang studi yang telah memiliki akta IV yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Sedangkan kualifikasi Tutor Paket C harus berakademik minimum Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV) pendidikan bidang studi atau Sarjana bidang studi yang telah memiliki akta IV yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.



"Tutor pada pendidikan kesetaraan diwajibkan memiliki sertifikat tutor. Sertifikat tutor diperoleh setelah mengikuti pelatihan dan lulus uji kompetensi tutor yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah," terang Komaruddin.

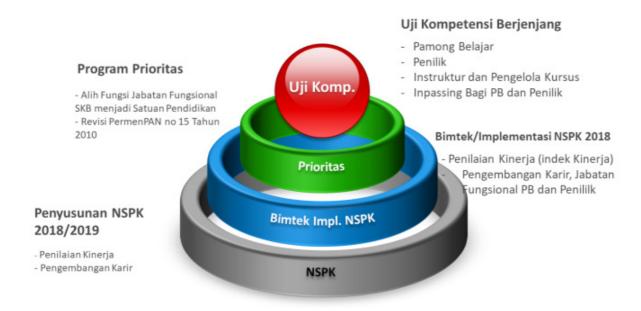
Program inovasi lainnya adalah penjenjangan instruktur kursus dan pelatihan (PIKP). Penjejangan instruktur kursus dan pelatihan ini digunakan untuk memudahkan instruktur memasuki dunia kerja yang dibutuhkan. Penjejangan ini diatur di dalam Kerangkan Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI digunakan sebagai dasar penyetaraan kompetensi seorang instruktur secara global. Dengan instruktur sebagai tenaga kerja maka dituntut melakukan penyesuaian kompetensi dengan standar dari KKNI untuk bisa bersaing dengan tenaga kerja lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

Selain penjenjangan instruktur bedasarkan KKNI, juga akan dilaksanakan diklat fungsional untuk pamong belajar dan penilik. Program ini melanjutkan dari yang sudah dilaksanakan tahun 2017 lalu.

PROGRAM STRATEGIS SUBDIREKTORAT PENILAIAN KINERJA DAN PENGEMBANGAN KARIER TAHUN 2018

Untuk tahun 2018, Subdirektorat Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karier telah merancang sejumlah program strategis. Meliputi uji kompetensi berjenjang meliputi pamong belajar, penilik, instruktur dan pengelola kursus serta untuk program impassing bagi guru bukan PNS. Selain itu juga telah dirancang bimbingan teknis serta implementasi NSPK tahun 2018 yang meliputi NSPK untuk penilaian kinerja (Indeks Kinerja), pengembangan karier jabatan fungsional pamong belajar dan penilik. Selain itu juga telah dirancang program penyusunan NSPK penilaian kinerja dan pengembangan karier. Juga ada beberapa program prioritas, meliputi alih fungsi jabatan fungsional SKB menjadi satuan pendidikan, serta revisi PermenPAN no 15 tahun 2010. Selengkapnya dapat dilihat dalam grafis berikut ini.

Program Rencana Anggaran 2018



Sejumlah program telah dirancang Subdit PKPK Dit. PGTK PAUD dan Dikmas untuk tahun 2018

Agar program berjalan dengan baik, tepat sasaran, efektif dan efisien, telah ditetapkan beberapa target binaan yang menjadi sasaran Subdit PKPK. Target sasaran tersebut terbagi menjadi dua kelompok, yakni guru PAUD dan tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas. Jenis GTK yang masuk di dalam dua kelompok tersebut terlihat sebagaimana tabel di berikut ini.

SASARAN GTK PAUD DIKMAS

GURU PAUD DIKMAS

- 1. Guru PAUD/TK
- 2. Guru Pendamping PAUD
- 3. Pamong Belajar
- 4. Tutor (Kesetaraan, Keaksaraan)
- 5. Instruktur

TENDIK PAUD DIKMAS

- 1. Kepala PAUD/TK
- 2. Pengelola KB/TPA/SPS
- 3. Kepala Satuan Pendidikan PNF (SKB)
- 4. Pengelola Kursus dan Pelatihan
- 5. Pengawas PAUD/TK
- 6. Penilik (PAUD, Kesetaraan dan Keaksaraan Kursus

Tabel Jenis GTK PAUD dan Dikmas yang menjadi sasaran binaan Subdit PKPK.

Berikut ini rincian program subdit PKPK tahun 2018 lebih detail.

Subdit Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karir Tahun 2018 • A. Rencana UjiKom = 3.000 Org • Calon TPAK PB dan Penilik = 240 Org • - Pamong Belajar = 1.050 Org Calon TPAK Guru dan Pengawas TK • - Penilik = 1.950 Org B. Rencana Inpassing = 394 Q Bimtek Ja Fung PB dan Penilik = 480 Org TOT JaFung PB, dan Penilik = 160 Inpassing PB = 118 Org • - Inpassing Penilik = 276 **Pembinaan** Kompetensi Karir Penyetaraan Penilaian Kinerja **BPNS** FOT Guru , Kepala , dan Pengws TK = 240 Org •Inst. Kursus = 80 Org •Total Berkas Entry 62.279 Berkas Memenuhi Syarat = 32.684 Berkas Harus Diperbaiki = 29.595 Bimtek Penilaian Kinerja Guru, Kepala, Pengawas, dan Inst.Kursus = 640 Org •Terbit PAK dan SK 24.855 •Terkirim = 13.027

- UJI KOMPETENSI REGULER DAN INPASSING
- A. Rencana UjiKom = 9.214 Org
- - Pamong Belajar = 2,917 Org
- - Penilik = 6.297 Org
- Keterangan dari jumlah yg ada dikurangi yg telah ikut di tahun 2017
- B. Rencana Inpassing = 394 Org
- - Inpassing PB = 118 Org
- - Inpassing Penilik = 276 Org

• PENGEMBANGAN KARIR

- Calon TPAK PB = 120 Org
- Calon TPAK Penilik = 120 Org
- Calon TPAK Guru TK = 80 Org
- Calon TPAK Pengawas TK = 80 Org
- Bimtek Ja Fung PB = 240 Org
- Bimtek JaFung Penilik = 240 Org
- TOT JaFung PB = 80 Org
- TOT JaFung Penilik = 80 Org

• PENYETARAAN GURU TK BPNS

- •Total Berkas Entry 62.279 Berkas
- •Berkas Memenuhi Syarat = 32.684
- •Berkas Harus Diperbaiki = 29.595
- •Terbit PAK dan SK = 24.855
- •PAK dan SK Belum Terbit = 32.684 24.855 = **7.829**
- •Terkirim = 13.027

•PENILAIAN KINERJA

- •TOT Guru TK = 80 Org
- •TOT Kepala TK = 80 Org
- •TOT Pengawas TK = 80 Org
- •Inst. Kursus = 80 Org
- •Bimtek Penilaian Kinerja Guru, Kepala, Pengawas, dan Inst.Kursus = 640 Org



PROGRAM SUBDIT PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENINGKATAN KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI



alam Permendikbud No II Tahun 2015, dijelaskan dalam pasal 154 bahwa Subdirektorat Perencanaan Kebutuhan, Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi (Subdirektorat PK PKK) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, rencana kebutuhan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, dan pemindahan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan dan penyusunan bahan pengendalian formasi guru dan pendidik lainnya pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Perencanaan Kebutuhan, Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan dan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- penyusunan bahan perencanaan kebutuhan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- penyusunan bahan pengendalian formasi guru dan pendidik lainnya pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- penyusunan bahan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- penyusunan bahan pemindahan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan kebutuhan dan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan kebutuhan dan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang perencanaan kebutuhan dan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.





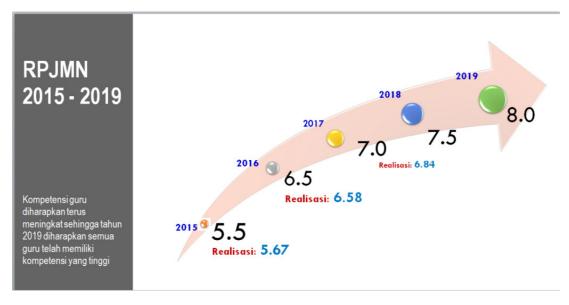
Subdirektorat Perencanaan Kebutuhan, Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi terdiri atas Seksi Perencanaan Kebutuhan dan Seksi Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi. Seksi Perencanaan Kebutuhan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, rencana kebutuhan, pemindahan, evaluasi dan laporan di bidang perencanaan kebutuhan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan dan penyusunan bahan pengendalian formasi guru dan pendidik lainnya pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Seksi Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi peningkatan kualifikasi dan kompetensi, evaluasi dan laporan di bidang peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

STRATEGI PEMBINAAN GTK PAUD DAN DIKMAS

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) menjadi salah satu strategi dalam mengawal kompetensi GTK PAUD dan Dikmas. PKB dilakukan berdasarkan kebutuhan guru yang bersangkutan. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan untuk mencapai dan/atau meningkatkan kompetensinya di atas standar kompetensi profesi guru. Hal ini nantinya juga sekaligus berimplikasi pada perolehan angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru.

PKB juga menjadi tahapan yang harus dilalui oleh setiap guru. dasar yang digunakan dalam mengikuti PKB ini berasal dari hasil nilai uji kompetensi. Seorang guru dengan nilai tertentu menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan dalam hal tertentu, yang artinya ia membutuhkan peningkatan untuk mendapatkan nilai maksimal. Nilai maksimal yang dimaksud tertera pada peta jalan yang telah dirancang Kemendikbud dalam hal ini Ditjen. GTK sejak 2015 lalu. Peta jalan tersebut terlihat sebagaimana gambar berikut ini.



Keterangan gambar: bagan peta jalan UKG yang diharapkan pada tahun 2019 tiap GTK mampu mencapai nilai maksimal yakni 8.0



Dari peta jalan dapat dilihat capaian nilai kompetensi GTK termasuk GTK PAUD dan Dikmas berada. Peta jalan tersebut bermaksud mendorong tiap guru untuk menjadi lebih kompeten dan profesional. Guru profesional adalah guru yang terus belajar dan mengembangkan diri bukan untuk pemerintah atau kepala sekolah, tapi memang sejatinya setiap pendidik atau guru adalah pembelajar. Hanya dari guru yang terus belajar dan berkarya akan muncul generasi pembelajar sepanjang hayat yang terus menerus berkontribusi pada masyarakat dan lingkungannya. Guru profesional adalah guru yang senantiasa terus belajar selama dia mengabdikan dirinya di dunia pendidikan. "Oleh karena itu, ketika seorang guru memutuskan untuk berhenti atau tidak mau belajar maka pada saat itu dia berhenti menjadi guru atau pendidik," jelas Agus Rachman, Kasubdit Perencanaan Kebutuhan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas.

CAPAIANN SUBDIREKTORAT PERENCANAAN KEBUTUHAN, PENINGKATAN KUALIFIKASI Dan kompetensi tahun 2017

Pada tahun 2017, Subdit PK PKK telah merancang sejumlah program prioritas. Program-program tersebut dapat dilihat sebagaimana bagan berikut ini.



Keterangan gambar: program prioritas tahun 2017 Subdit PK PKK

Uji kompetensi masih menjadi salah satu alat untuk mengukur kemampuan seorang GTK dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Uji kompetensi guru (UKG) yang diterapkan sejak tahun 2015 menunjukkan nilai yang belum menggembirakan, khususnya untuk kalangan GTK PAUD dan Dikmas. Fenomena ini menuntut Subdirektorat Perencanaan Kebutuhan, Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi harus bekerja keras mendongkrak profesionalisme guru yang salah satunya melalui sertifikasi pendidik. Melalui sertifikasi pendidik, guru diharapkan menjadi lebih profesional, selain itu seorang guru bisa lebih sejahtera karena mendapatkan tunjangan profesi pendidik yaotu Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Untuk mewujudkan hal itu, pada tahun 2017 telah dirumuskan beberapa target capaian di antaranya: ketersediaan jumlah guru TK yang bersertifikat pendidik sebanyak 24.513 orang, adanya peningkatan nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan guru TK dengan target capaian sebesar 7,0. Juga adanya GTK PAUD dan Dikmas yang terafiliasi peningkatan kariernya sebanyak 800 orang, adanya jumlah GTK PAUD dan Dikmas yang memperoleh peningkatan Kesejahteraan dan Harlindung sebanyak 73.315 orang, adanya jumlah guru TK/TKLB penerima subsidi tunjangan khusus sebanyak 1.900 orang, terwujudnya rasio guru TK dan siswa standar sebanyak 3.06 orang, dan tercapainya guru TK/TPA/KB minimal berkualifiksi S1/D IV sebanyak 225.958 orang.



Program-program tersebut dilaksanakan melalui bantuan pemerintah (bapem) oleh Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas yang disalurkan melalui Subdirektorat PK dan PKK kepada para mitra. Mitra-mitra tersebut adalah mitra kerja yang terpilih dan terpercaya, meliputi perguruan tinggi (PT), Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI), Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI), dan Pusat Kegiatan Gugus (PKG). PKG di sini dipahami sebagai pusat kegiatan guru, bukan penilaian kinerja guru. Pusat kegiatan gugus ini sama dengan KKG (Kelompok Kerja Guru) pada jenjang Sekolah Dasar (SD).

Mitra-mitra Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas memiliki tugas tersendiri. Untuk HIMPAUDI dan IGTKI bertugas melaksanakan Pelatihan Calon Pelatih (PCP). Mitra PKG bertugas melaksanakan Diklat Dasar. Sedangkan mitra perguruan tinggi bertugas memembantu percepatan peningkatan kualifikasi melalui program konversi. HIMPAUDI dan IGTKI telah melaksanakan PCP melalui bapem sebanyak 50 paket kepada 40 lembaga (HIMPAUDI dan IGTKI) dengan total peserta yang telah dilatih sebanyak 2.000 orang.

Untuk program PKG melakukan peningkatan kompetensi melalui bapem sebanyak 40 paket kepada 110 lembaga. Tiap paket kuota yang tersedia untuk 40 orang, sehingga total guru PAUD yang telah dilatih selama tahun 2017 sebanyak 4.400 orang. Dan untuk perguruan tinggi yang melaksanakan program Konversi telah membantu percepatan kualifikasi kepada 1.891 guru.



Berikut ini data GTK PAUD dan Dikmas yang telah menjadi sasaran pembinaan Subdit PK, PKK tahun 2017

Jenis Bantuan	Lembaga Penerima Bantuan	Jumlah Lembaga	Sasaran Orang Perpaket	Jumlah Sasaran	Jumlah Dana Perpaket
PCP Dasar	HIMPAUDI dan IGTK-PGRI	40 lbg	40 org	2000 org	Rp 75.000.000
Diklat Dasar	PKG	110 lbg	50 org	4400 org	Rp 48.000.000
Konversi	PERGURUAN TINGGI		1918 org	1819 org	Rp 3.500.000
Total				8219 org	

Program konversi ini dilakukan dengan mengumpulkan sertifikat hasil pelatihan di lembaga-lembaga yang diakui yang kemudian diakumulasi menjadi Satuan Kredit Semester (SKS). Kekurangan dari SKS untuk program sarjana (S1) maka harus ditempu melalui perkuliahan. Pemerintah telah menggelontorkan bantuan pendidikan untuk proses kuliah tersebut dengan besar 3,5 juta rupiah per orang.

Dalam upaya mewujudkan GTK yang profesional dan kompeten sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, maka Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas menetapkan program bantuan peningkatan kualifikasi akademik ke S1/D4 bagi guru PAUD sebagai program prioritas pendukung arah kebijakan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi. Bantuan diberikan bagi guru PAUD melalui 2 pola, yakni bantuan kualifikasi S1/D4 program reguler dan bantuan kualifikasi S1/D4 program konversi.

PROGRAM PEMBINAAN SUBDIREKTORAT PERENCANAAN KEBUTUHAN, PENINGKATAN KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI 2018

Dalam kurun tahun 2017, Subdit PK PKK telah merancang dan melaksanakan sejumlah program dan kegiatan berdasarkan data yang terdaftar dalam Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Penggunaan Dapodik ini diperlukan agar pelaksanakan program dan kegiatan tepat sasaran, efektif dan efisien.

Selain melakukan perencanaan kebutuhan, Subdit PK PKK juga akan melaksanakan peningkatan kualifikasi dan peningkatan kompetensi. Berikut ini bagan program 2018 yang akan dilaksanakan.

Berikut ini bagan yang memperlihatkan rancangan pembinaan yang akan dilaksanakan Subdirektorat PK, PKK tahun 2018.



Keterangan gambar: program prioritas Subdit PK PKK yang akan dilaksanakan tahun 2018. sumber Subdit. PKPKK

RANCANGAN PROGRAM PK - PKK PAUD DAN DIKMAS TAHUN 2018 PENINGKATAN KUAUFIKASI PENINGKATAN KOMPETENSI SERTIFIKASI GURU PERENCANAAN KEBUTUHAN (KONVERSI) PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN NSPK PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI (2KEG @ 40 ORG) PEDOMAN SERTIFIKASI GURU PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN NSPK PERENC. KUALIFIKASI BIMTEK PENINGKATAN KAJIAN DATA PEMETAAN CALON KOMPETENSI (PCP) KEBUTUHAN DAN ompetensi (PCP) tutor PESERTA SERTIFIKASI GURU (2 KEG @ 30 ORG) PENATAAN GTK PAUD KESETARAAN INSTRUKTUR KURSUS (2 KEG @ 40 DRG) DIKMAS -(2 KEG @ 35 ORG) PENYUSUNAN, PERAKITAN, & BIMTEK PENINGKATAN BIMTEK PENINGKATAN DIGITALISASI SOAL SERTIFIKASI ipetensi (PCP) penguji GURU (2 KEG 2 30 ORG) KOORDINASI PROGRAM PENGUJI GURU PAUD INSTRUKTUR KURSUS **PENINGKATAN** UJICOBA SOAL SERTIFKASI KOORDINASI SOLUSI KUALIFIKASI GTK PAUD KELEBIHAN GURU TK (2 KEG @ 300 ORG) DAN DIKMAS PNS DENGAN SINKRONISASI PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI (1 KEG @ 50 ORG) ANALISIS HASIL UJICOBA SOAL KAB/KOTA GTK PAUD DAN DIKMAS SERTIFIKASI GURU (1 KEG @ 80 ORG) (3 KEG @ 114 DRG) (3 KEG @ 42 ORG) PEMBERIAN DAN PENCAIRAN BANTUAN PEMERINTAH DIKLAT GURU PENDAM BANDIK KUALIFIKASI PCP GPM LEVEL III SERTIFIKASI GURU KONVERSI PENGENDALIAN MIINA LEVEL III (10 PKT) (1.002 ORG) FORMASI GURU (670 PKT) (1.819 ORG) (1 KEG @ 70 ORG) -REVIEW PROGRAM PENINGKATAN PENDAMPINGAN TATA KELDI A KUALIFIKASI BAGI GTK PAUD DAN KOMPETENSI GTK PAUD DAN DIKMAS KEUANGAN SERTIFIKASI GURU KE PT

Dari bagan tersebut, selanjutnya diterapkan melalui beberapa kegiatan yang terinci sebagaimana bagan berikut ini.

Keterangan gambar: bagan rencana kegiatan Subdit PKPKK yang akan dilaksanakan tahun 2018.

(3 KEG @ 114 ORG)

DIKMAS (1 KEG @ 50 DRG

Dari bagan di atas dapat dijelaskan, bahwa dalam pemenuhan kebutuhan dan penataan GTK PAUD dan Dikmas akan dilaksanakan terlebih dahulu dengan membuat buku pedoman melalui NSPK. Dari NSPK selanjutnya akan dilakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota mengenai kelebihan dan kekurangan GTK PAUD dan Dikmas berikut mencari solusinya. Selanjutnya dilangsungkan pula koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota mengenai pengelolaan GTK PAUD dan Dikmas. Kegiatan ini masing-masing dilaksanakan dalam 1 kegiatan dengan mengundang sebanyak 80 dan 70 orang.

Pada peningkatan kompetensi GTK PAUD dan Dikmas akan dilakukan kegiatan bimbingan teknis peningkatan kompetensi melalui Pelatihan Calon Pelatih (PCP) untuk tutor pendidikan kesetaraan serta PCP bagi instruktur kursus dan pelatihan. Selain itu akan diselenggarakan pula kegiatan PCP bagi pengelola PAUD serta PCP bagi tim penguji instruktur kursus.

Untuk PCP tutor pendidikan kesetaraan akan dilaksanakan dalam empat kegiatan. Masing-masing kegiatan kuota peserta yang diikuti sebanyak 43 orang sehingga total sebanyak 172 orang. Sedangkan pada PCP instruktur kursus akan dilaksanakan sebanyak 3 kegiatan dan kuota tiap kegiatan diikuti sebanyak 42 orang sehingga total yang menjadi sasaran sebanyak 126 orang.

Pada kegiatan PCP untuk pengelola PAUD akan dilaksanakan dalam 5 kegiatan dan masing-masing kegiatan sebanyak 50 orang. Sehingga total yang akan menjadi sasaran tahun 2018 sebanyak 250 orang. Dan untuk PCP penguji instruktur kursus juga akan dilaksanakan dalam 5 kegiatan dengan tiap kegiatan sebanyak 42 orang sehingga total peserta yang menjadi sasaran tahun 2017 sebanyak 210 orang. Selain kegiatan di atas, juga telah dirancang kegiatan peningkatan kompetensi guru PAUD untuk guru pendamping level III sebanyak 670 paket dan 10 paket



Pada peningkatan kompetensi melalui sertifikasi akan dilakukan terlebih dahulu penyusunan pedoman pelaksanaan seritifikasi melalui empat kegiatan dengan tiap kegiatan mengundang 40 peserta. Selanjutnya, dilakukan kajian data peserta yang akan mengikuti sertifikasi melalui dua kegiatan dengan peserta masing-masing kegiatan sebanyak 40 orang.

Untuk kelangsungan sertifikasi akan dilakukan juga penyusunan, perakitan, dan digitalisasi soal sertifikasi melalui dua kegiatan dengan mengundang masing-masing kegiatan sebanyak 40 orang. Setelah itu ke lapangan untuk uji coba soal sertifikasi dengan jangkauan peserta sebanyak 600 orang yang terbagi dalam dua kegiatan. Selanjutnya akan dilakukan analisis hasil uji coba sertifikasi. "Tahun 2018 target GTK PAUD dan Dikmas yang bersertifikasi sebanyak 1002 orang. Semoga kami dapat melaksanakan dan mencapai target tersebut," ujar Agus Rachman.

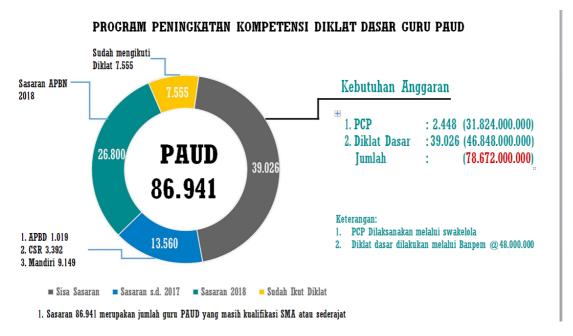
Sedangkan dalam upaya meningkatkan kualifikasi akan telah dirancang beberapa kegiatan. Kegiatan peningkatan kualifikasi akan didahului dengan penyusunan pedoman (NSPK) peningkatan kualifikasi melalui dua kegiatan. Masing-masing kegiatan akan mengundang 30 orang sehingga total yang terlibat dalam penyusunan NSPK ini sebanyak 60 orang.

Sebelum dilaksanakan, program peningkatan kualifikasi ini akan dilaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dengan mengundang peserta sebanyak 50 orang. Salah satu program peningkatan kualifikasi ini melalui bantuan pendidikan pada program konversi di perguruan tinggi. Ditargetkan tahun 2017 mampu menjangkau 1819 orang yang melakukan kuliah di perguruan tinggi melalui program konversi.

Lebih detail kegiatan yang akan dilaksanakan Subdirektorat Perencanaan Kebutuhan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi tahun 2018 adalah sebagai berikut:

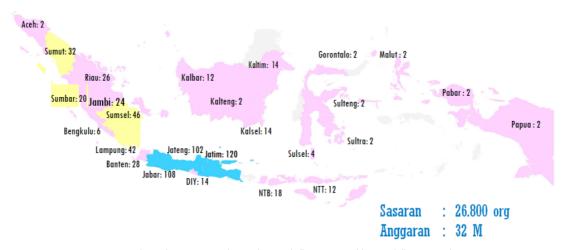
N0	NAMA KEGIATAN	SASARAN	N0	NAMA KEGIATAN	SASARAN		
Penat	Penataan Guru dan Tendik Dikmas			GTK PAUD dan Dikmas yang Menerima Bantuan Kualifikasi S1/DIV			
1	Pengembangan NSPK Perencanaan Kebutuhan dan Penataan GTK PAUD dan Dikmas	1 Dokumen	1	Pengembangan NSPK Peningkatan Kualifikasi	1 Dokumen		
2	Koordinasi Solusi Kelebihan Guru TK PNS Dengan Kab/Kota	80 Orang	2	Koordinasi dan Review Program Peningkatan Kualifikasi Bagi GTK PAUD dan Dikmas	100 Org		
3	Koordinasi Pengendalian Formasi Guru	70 Orang	3	Pemberian dan Pencairan Bantuan Pemerintah (Bapem) Bandik Konversi	1.819 Orang		
Guru 1	TK/TKLB yang Mengikuti Sertifikasi Guru		Rata-rata Nilai Kompetensi GTK PAUD dan Dikmas				
1	Penyusunan dan Pengembangan Pedoman Sertifikasi Guru	1 Dokumen	1	Penyusunan dan Pengembangan NSPK Program Peningkatan Kompetensi	12 Dokumen		
2	Kajian Data Pemetaan Calon Peserta Sertifikasi Guru	80 Org	2	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi (PCP) Tutor Kesetaraan	172 Org		
3	Penyusunan, Perakitan, dan Digitalisasi Soal Sertifikasi Guru	60 Org	3	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi (PCP) Instruktur Kursus	250 Org		
4	Ujicoba Soal Sertifikasi Guru	600 Org	4	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi (PCP) Penguji Guru PAUD	126 Org		
5	Analisia Hasil III: Caha Caal Castifilasi Cum.	80 Org	5	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi (PCP)	126 Org		
3	Analisis Hasil Uji Coba Soal Sertifikasi Guru	80 Olg	6	Penguji Instruktur Kursus Sinkronisasi dan Koordinasi Program Peningkatan	670 Paket/3 Keg		
6	Pendampingan Tata Kelola Keuangan Sertifikasi	3 Lokasi		Kompetensi GTK PAUD dan Dikmas			
	Guru Tahun 2018		7	Review Program Peningkatan Kompetensi GTK	670 Paket/3 Keg		
7	Pemberian dan Pencairan Bantuan Pemerintah (Bapem) Sertifikasi	1.002 Orang		PAUD dan Dikmas			

Selain itu telah dirancang pula kegiatan peningkatan kompetensi melalui diklat dasar bagi guru PAUD. Terdapat 86.941 guru yang masih berkualifikasi SMA yang perlu ditingkatkan kompetensinya.



keterangan gambar: program peningkatan kompetensi yang akan dilaksanakan tahun 2018

KUOTA BANPEM PENINGKATAN KOMPETENSI GURU PAUD 2018



Keterangan gambar: sebaran guru paud yang akan menjadi sasaran pembinaan subdit PK PKK tahun 2018

RANCANGAN PROGRAM DIKLAT PENDAMPING MUDA LEVEL 3

No	Provinsi/Kab./Kota	Paket Diberikar
1	Prop. Aceh	2
•	Kab. Aceh Selatan	2
2	Prop. Riau	26
•	Kab. Bengkalis	4
	Kab, Indragiri Hilir	2
	Kab. Indragiri Hulu	2
	Kab. Kampar	2
	Kab. Kepulauan Meranti	4
	Kab. Rokan Hilir	4
	Kab. Rokan Hulu	2
	Kab. Siak	4
	Kota Pekanbaru	2
3	Prop. Sumatera Barat	20
	Kab. Agam	2
	Kab. Padang Pariaman	2
	Kab. Pasaman	4
	Kab. Pesisir Selatan	2
	Kab. Sijunjung	4
	Kota Padang	2
	Kota Payakumbuh	2
	Kota Sawah Lunto	2
4	Prop. Sumatera Utara	32
	Kab. Asahan	2
	Kab. Batubara	2
	Kab. Dairi	2
	Kab. Deli Serdang	4
	Kab. Humbang Hasudutan	2
	Kab. Labuhan Batu	2
	Kab. Labuhan Batu Utara	2
	Kab. Mandailing Natal	2
	Kab. Nias	2
	Kab. Nias Utara	2
	Kab. Padang Lawas	2
	Kab. Serdang Bedagai	2
	Kab. Simalungun	2
	Kab. Tapanuli Tengah	2
	Kota Pematangsiantar	2

No	Provinsi/Kab./Kota	Paket Diberikan
5	Prop. Jambi	24
	Kab. Batang Hari	4
	Kab, Bungo	2
	Kab. Merangin	2
	Kab. Sarolangun	4
	Kab. Tanjung Jabung Barat	2
	Kab. Tanjung Jabung Timur	2
	Kab. Tebo	4
	Kota Jambi	2
	Kota Sungai Penuh	2
6	Prop. Kepulauan Riau	4
	Kab. Karimun	2
	Kab. Lingga	2
7	Prop. Lampung	42
	Kab. Lampung Selatan	8
	Kab. Lampung Tengah	4
	Kab. Lampung Timur	2
	Kab. Lampung Utara	6
	Kab. Pesawaran	4
	Kab. Pringsewu	2
	Kab. Tanggamus	4
	Kab. Tulang Bawang	2
	Kab. Tulang Bawang Barat	
	Kab. Way Kanan	2
	Kota Bandar Lampung	4
	Kota Metro	2
8	Prop. Sumatera Selatan	46
	Kab. Banyuasin	6
	Kab. Lahat	4
	Kab. Muara Enim	2
	Kab. Musi Banyuasin	6
	Kab. Ogan Ilir	6
	Kab. Ogan Komering Ilir	6
	Kab. Ogan Komering Ulu	2
	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	4
	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	6
	Kota Palembang	4

No	Provinsi/Kab./Kota	Diberikan
9	Prop. Bangka Belitung	8
	Kab. Bangka	2
	Kab. Bangka Barat	2
	Kab. Bangka Tengah	2
	Kota Pangkalpinang	2
10	Prop. Banten	28
	Kab. Lebak	8
	Kab. Pandeglang	6
	Kab. Tangerang	4
	Kota Cilegon	4
	Kota Serang	2
	Kota Tangerang Selatan	4
11	Prop. Bengkulu	6
	Kab. Bengkulu Selatan	2
	Kota Bengkulu	4
12	Prop. Jawa Barat	108
	Kab. Bandung	8
	Kab. Bandung Barat	4
	Kab. Bekasi	4
	Kab. Ciamis	6
	Kab. Cianjur	8
	Kab. Cirebon	4
	Kab. Garut	8
	Kab. Indramayu	6
	Kab. Karawang	4
	Kab. Kuningan	6
	Kab. Majalengka	4
	Kab. Subang	6
	Kab. Sukabumi	4
	Kab. Sumedang	10
	Kab. Tasikmalaya	4
	Kota Bandung	4
	Kota Bekasi	4
	Kota Cimahi	4
	Kota Cirebon	2
	Kota Depok	4
	Kota Tasikmalaya	4

No	Provinsi/Kab./Kota	Paket Diberikan
13	Prop. D.I. Yogyakarta	14
	Kab. Bantul	4
	Kab. Gunung Kidul	4
	Kab. Kulon Progo	4
	Kab. Sleman	2
14	Prop. Jawa Tengah	102
	Kab. Banjarnegara	2
	Kab. Banyumas	4
	Kab. Blora	4
	Kab. Boyolali	2
	Kab. Brebes	4
	Kab. Cilacap	6
	Kab. Jepara	8
	Kab. Karanganyar	2
	Kab. Kebumen	4
	Kab. Kendal	4
	Kab. Klaten	4
	Kab. Kudus	4
	Kab. Magelang	2
	Kab. Pati	4
	Kab. Pekalongan	2
	Kab. Pemalang	6
	Kab. Purbalingga	6
	Kab. Purworejo	4
	Kab. Rembang	4
	Kab. Semarang	2
	Kab. Sragen	2
	Kab. Sukoharjo	4
	Kab. Temanggung	2
	Kab. Wonogiri	2
	Kab. Wonosobo	2
	Kota Pekalongan	2
	Kota Semarang	6
	Kota Surakarta	2
	Kota Tegal	2

Lanjutan

No	Provinsi/Kab./Kota	Paket Diberikan
15	Prop. Jawa Timur	120
	Kab. Banyuwangi	4
	Kab. Bojonegoro	8
	Kab. Bondowoso	10
	Kab. Gresik	4
	Kab. Jember	4
	Kab. Jombang	4
	Kab. Kediri	6
	Kab. Lamongan	4
	Kab. Lumajang	4
	Kab. Madiun	4
	Kab. Magetan	2
	Kab. Malang	10
	Kab. Mojokerto	4
	Kab. Nganjuk	4
	Kab. Pacitan	4
	Kab. Ponorogo	2
	Kab. Probolinggo	8
	Kab. Sidoarjo	8
	Kab. Situbondo	4
	Kab. Sumenep	4
	Kab. Trenggalek	2
	Kab. Tulungagung	4
	Kota Malang	6
	Kota Pasuruan	2
	Kota Surabaya	4
16	Prop. Nusa Tenggara Barat	18
	Kab. Bima	4
	Kab. Dompu	2
	Kab. Lombok Barat	2
	Kab. Lombok Timur	4
	Kah Sumhawa	6

No	Provinsi/Kab./Kota	Paket Diberika
NO	FIOVIIIS#RADJROta	n
17	Prop. Kalimantan Barat	12
	Kab. Ketapang	2
	Kab. Kuburaya	2
	Kab. Mempawah	2
	Kab. Sambas	2
	Kota Pontianak	4
18	Prop. Kalimantan Selatan	14
	Kab. Banjar	4
	Kab. Barito Kuala	4
	Kab. Tanah Laut	2
	Kota Banjarbaru	2
	Kota Banjarmasin	2
19	Prop. Kalimantan Tengah	2
	Kab. Kapuas	2
20	Prop. Kalimantan Timur	14
	Kab. Berau	2
	Kab. Kutai Kartanegara	2
	Kota Balikpapan	4
	Kota Bontang	2
	Kota Samarinda	4
21	Prop. Maluku Utara	2
	Kab. halmahera Utara	2
22	Prop. Nusa Tenggara Timur	
	Kab. Belu	2
	Kab. Kupang	2
	Kab. Sikka	2
	Kab. Timor Tengah Selatan	2
	Kab. Timor Tengah Utara	2
	Kota Kupang	2





670 Pkt dengan jumlah sasaran 26.800 Guru TK/KB/TPA/SPS





MEWUJUDKAN PTK PAUD DAN DIKMAS YANG SEJAHTERA, PROFESIONAL DAN BERMARTABAT



eceriaan itu bukan hanya milik Ema Purnamasari, S.Ag, yang menyabet Juara I Instruktur Tata Kecantikan Rambut dan Ade Lilis Suhelmi, S.Pd., yang meraih juara I Pamong Belajar di Sanggar Kegiatan Belajar, pada ajang Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas Berprestasi 2017. Tapi juga milik kontingen Jawa Barat, tempat Ema dan Ade bernaung, yang sukses meraih Juara Umum pada ajang tahunan unjuk kompetensi para GTK PAUD dan Dikmas se-Indonesia ini.

Bengkulu yang menjadi tuan rumah gelaran Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas itu juga senang dan bangga. "Kami dan warga Bengkulu merasa sangat terhormat sekaligus bangga luar biasa Pemerintah Provinsi Bengkulu menjadi tuan rumah," kata Dr. Drh. Rohidin Mersyah, Plt Gubernur Bengkulu kala memberikan sambutan. Bukan semata menampilkan prestasi dan dedikasi dari peserta berbagai daerah. Melainkan juga kegiatan tersebut menjadi wahana pertemuan peserta daerah dengan latar belakang ragam budaya nusantara, yang akan menjadi perekat persatuan dan kesatuan.

Sejak tahun 2010, perhelatan Apresiasi GTK PAUD Berprestasi Nasional digelar di daerah. Sebelumnya, kala ajang masih bernama Jambore 1000 PTK-PNF selama kurun 2007-2010, penyelenggara kegiatan adalah daerah yang meraih juara umum. Hanya Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, tim yang sukses meraih juara umum pada periode tersebut. Jawa Tengah merajai pada tahun 2007, 2008, dan 2010. Yogyakarta menjuarai tahun 2009.

Kebijakan berubah tahun 2010, sekaligus mengubah nama kegiatan menjadi Apresiasi PTK PAUDNI Nasional. Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi yang pertama menggelar kegiatan, tak lagi Jawa Tengah dan DIY, yang selalu menjadi tuan rumah sebelumnya. Nama kegiatan kemudian berubah lagi menjadi Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi sejak tahun 2015.

Gelaran aneka lomba tersebut menjadi salah satu wujud penghargaan yang diberikan Direktorat GTK PAUD dan Dikmas kepada para PTK PAUD Dikmas. Apresiasi dalam bentuk penghargaan kepada para GTK PAUD dan Dikmas juga diberikan melalui Pemilihan GTK PAUD Berprestasi Tingkat Nasional, Lomba Karya Inovasi Pembelajaran dan Pengelolaan Satuan Pendidikan PAUD dan Dikmas. Tahun 2018 ini, ada satu lagi apresiasi pemerintah berupa Insan Peduli PAUD dan Dikmas, yang dberikan kepada warga masyarakat, bukan para guru dan tendik, yang telah menjalankan fungsi dan peran PTK PAUD dan Dikmas.



Pemberian penghargaan itu merupakan salah satu tugas dan fungsi yang diemban Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan (Subdit Kesharlindung), Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas. Selain itu, Subdit Kesharlindung juga bertanggung jawab terhadap pemberian kesejahteraan dan perlindungan. Hal ini merupakan amanah dari Pasal 147 butir g, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketentuan tersebut menyatakan Direktorat GTK PAUD dan Dikmas menjalankan fungsi: "peningkatan kesejahteraan serta pemberian penghargaan dan perlindungan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, serta satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat Indonesia di luar negeri".

Apresiasi tinggi pada profesi guru bukan semata fenomena di Tanah Air, melainkan sudah menjadi fenomena global. Apresiasi itu tampak amat nyata di banyak negara dan di dunia internasional. Seperti halnya pemerintahan dan masyarakat di banyak negara, pemerintah dan masyarakat Indonesia memosisikan profesi guru sangat terhormat, baik secara formal maupun sosial.

Guru sebagai Profesi (GSP) juga telah dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 2 Desember 2004. Pencanangan GSP merupakan pengakuan formal atas "profesi guru" sebagai profesi yang bermartabat. Hal ini diharapkan menjadi tonggak awal bangkitnya apresiasi tinggi pemerintah dan masyarakat terhadap profesi guru, ditandai dengan perbaikan kesejahteraan, pemberian penghargaan, perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi para guru.

Profesi guru telah dinaungi dan dilindungi secara hukum oleh Undang-Undang, yaitu UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Di luar kerangka perlindungan bagi profesi guru, yang tidak kalah esensialnya, lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2005 merupakan satu bentuk penghargaan pemerintah atas penyandang profesi ini. Penghargaan bagi penyandang guru memperoleh tempat khusus di dalam UU No. 14/2005.

Dalam UU tersebut diamanatkan bahwa guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan. Demikian juga, guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Penghargaan dapat diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan.

Dibentuknya Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan, dan Perlindungan, pada Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas diharapkan mampu meningkatkan kesejehteraan, penghargaan, dan perlindungan bagi GTK PAUD dan Dikmas. Hal ini berbeda dengan GTK pada satuan pendidikan formal yang mendapat tingkat kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan yang sudah relatif mapan.

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PTK PAUD DAN DIKMAS

Pemberian kesejahteraan menjadi program prioritas Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas. Upaya peningkatan kesejahteraan PTK PAUD dan Dikmas sudah dirintis sejak era Direktorat PTK-PNF. Di antaranya dalam bentuk pemberian bantuan insentif bagi tutor PAUD dan Dikmas, honorarium tenaga lapangan dikemas (TLD)/fasilitator desa intensif (FDI), dan bantuan pengembangan profesi bagi pamong belajar dan penilik. Keterbatasan anggaran bantuan tersebut menyebabkan bantuan insentif belum dapat menjangkau seluruh PTK PAUD dan Dikmas.

Sejumlah tunjangan yang sudah diberikan meliputi: a) Tunjangan Profesi bagi Guru TK PNS dan Guru TK Bukan PNS; b) Tunjangan Khusus bagi Guru TK yang berada di daerah sangat tertinggal; c) Tunjangan Penghasilan bagi guru TK bukan PNS; d) Tunjangan Penghasilan bagi Guru KB/TPA/SPS.

Pemberian aneka tunjangan tersebut berjalan lancar karena sudah mengacu pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik). "Sepanjang data sudah lengkap dan benar, valid, sesuai Dapodik, tidak ada kesulitan dalam penyalurannya," kata Dra. Suhatri, Kepala Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan, dan Perlindungan.

Persyaratan penerima tunjangan profesi guru TK non PNS meliputi: a) memiliki sertifikat pendidik; b) memiliki NRG; c) memiliki NUPTK; d) jam mengajar minimal 24 jam; e) Rombel minimal 15 siswa; f) terdaftar di Dapodik; dan g) guru tetap yayasan.

Persyaratan penerima tunjangan khusus guru TK non PNS meliputi: a) memiliki NUPTK; b) terdaftar di Dapodik; c) berada di daerah sangat tertinggal sesuai kriteria KPDT; d) Diutamakan S1/DIV; e) masa kerja minimal dua tahun berturut-turut; f) Jumlah guru penerima tidak melebihi kebutuhan ideal.

Persyaratan penerima insentif guru TK bukan PNS meliputi: a) Guru TK tetap bukan PNS di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau Masyarakat; b) Memiliki kualifikasi S-1/DIV; c) terdaftar di Dapodik; d) Diprioritaskan memiliki masa kerja minimal 10 tahun; dan e) memiliki NUPTK.





Persyaratan penerima insentif guru KB/TPA/SPS, meliputi: a) diutamakan memiliki sertifikat berjenjang; b) memiliki KTP; c) masa kerja minimal 2 tahun; d) Rombel minimal 10-15 siswa; e) terdaftar di Dapodik; f) bukan penerima bantuan APBD.

Sebelum tunjangan disalurkan, Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas mengirimkan daftar penerima tunjangan yang sudah memenuhi persyaratan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Dinas Pendidikan mengecek kembali, memverifikasi, kemudian menetapkan penerima tunjangan sesuai alokasi.

Misalnya, menurut Dapodik ada 1000 penerima tunjangan, maka agar ada pemerataan, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang memilihnya, karena mereka yang paling tahu data guru di lapangan. Verifikasi yang dilakukan, di antaranya, kesesuaian jam mengajar, masih aktif tidaknya mengajar, dan guru tidak menerima tunjangan sejenis yang dikucurkan dari APBD. "Di sejumlah daerah ada juga alokasi anggaran dari APBD yang diberikan kepada guru TK. Verifikasi ini supaya tidak dobel akunting, bahwa guru yang akan mendapat tunjangan dari APBN, apakah sudah mendapat pula tunjangan dari APBD," katanya.

Menurut Suhatri, Dapodik saat ini sudah merekam data PTK PAUD dan Dikmas. "Masih ada yang belum tercatat, apalagi di daerah khusus atau daerah 3T. Aksesnya sulit. Internet juga tidak ada di daerah sangat tertinggal," kata Suhatri, yang punya pengalaman pengabdian di sejumlah direktorat di era Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah. Sebelum mengemban amanah sebagai Kasubdit Kesharlindung, Suhatri pernah bertugas pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Direktorat Pendidikan Kesetaraan, serta Direktorat Pembinaan Generasi Muda. Suhatri juga pernah bertugas pada pendidikan formal, yakni Kepala Bagian Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kasubdit PKLK Direktorat P2TK Dikmen, dan Kasubdit PKLK Tenaga Kependidikan Dikdasmen.

Sekali pun ada yang merasa masuk kategori di daerah khusus, Subdit Kesharlindung tidak serta merta memasukkan usulan daerah tersebut. "Kami mengacu pada ketentuan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal," katanya. PTK PAUD dan Dikmas menjadi tanggung jawab Subdit Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, dan Satuan Pendidikan PAUD dan Dikmas di Luar Negeri.









Besaran tunjangan yang diberikan meliputi:

- Tunjangan Profesi Guru TK bukan PNS setara satu kali gaji pokok bagi guru TK yang sudah sertifikasi sedangkan yang belum sertifikasi sebesar Rp1.500.000/bulan.
- Tunjangan khusus bagi guru TK bukan PNS sebesar Rp1.500.000/bulan yang dibayarkan dua kali dalam setahun.
- Tunjangan Penghasilan bagi guru TK bukan PNS sebesar Rp300.000/bulan.
- Tunjangan Penghasilan bagi guru KB/TPA/SPS sebesar Rp1.500.000/tahun yang dibayarkan tiga bulan sekali.

UDAIAN	TAHUN 2016			TAHUN 2017		
URAIAN	SSR		DANA	SSR		DANA
Tunjangan Profesi Guru TK Non PNS	61,886	Org	1,159,817,495,000	64,337	Org	1,281,793,480,000
Tunjangan Khusus Guru TK	1,900	Org	40,632,903,000	459	Org	8,262,000,000
Insentif Guru TK Non PNS	26,200	Org	94,320,000,000	33,155	Org	119,358,000,000
Bantuan Insentif bagi Guru KB/TPA/SPS	23,600	Org	35,400,000,000	23,600	Org	35,400,000,000

- Tunjangan Profesi Guru TK Non PNS setara 1 x qaji yang sudah penyetaraan, Rp. 1,5 juta orang/bulan bagi yang belum penyetaraan
- Tunjangan Khusus bagi Guru TK Non PNS = Rp. 1,5 juta orang/bulan
- Insentif Guru TK Non PNS = Rp. 300 ribu/orang/bulan, dibayarkan dua kali setahun
- Bantuan Insentif Guru KB/TPA/SPS = Rp. 1,5 juta/orang/tahun, dibayarkan tiga bulan sekali

Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru TK PNS dibayarkan oleh Pemda.

MENGAPRESIASI PRESTASI DAN DEDIKASI

Secara historis pemilihan guru berprestasi adalah pengembangan dari pemberian predikat keteladanan kepada guru melalui pemilihan guru teladan yang berlangsung sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 1997. Tahun 1998 sampai dengan tahun 2001, pemilihan guru teladan dilaksanakan hanya sampai dengan tingkat provinsi. Kemdikbud kemudian melakukan evaluasi dan menerima masukan dari berbagai kalangan, baik guru maupun pengelola pendidikan tingkat kabupaten/kota/provinsi, maka pemilihan guru teladan ditingkatkan kualitasnya menjadi pemilihan guru berprestasi.

Pemilihan guru berprestasi dilaksanakan pertama kali pada tahun 2002. Frasa "guru berprestasi" bermakna "prestasi dan keteladanan" guru. Penyelenggaraan pemilihan guru berprestasi dilaksanakan secara bertingkat, dimulai dari tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan tingkat nasional.

Pelaksanaan pemilihan guru berprestasi kemudian dikembangkan juga kepada tenaga kependidikan berprestasi. Tenaga kependidikan yang mendapat label penghargaan "berprestasi" meliputi kepala sekolah, pengawas sekolah, tenaga administrasi, tenaga laboratorium, dan tenaga perpustakaan.

Kegiatan pemberian penghargaan kepada GTK PAUD dan Dikmas dibedakan menurut jenis pendidikan formal dan nonformal. Pemilihan GTK PAUD Berprestasi Nasional diikuti guru, kepala, dan pengawas TK (PAUD formal). Sedangkan penghargaan untuk GTK PAUD nonformal dan GTK Dikmas melalui kegiatan Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi Nasional. Selain itu ada juga penghargaan dalam bentuk lain, yakni melalui program pengayaan kompetensi bagi para juara 1 GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi dengan memberangkatkan mereka mengikuti studi banding ke luar negeri.



Pemberian penghargaan ini selain untuk memacu pemerataan mutu GTK PAUD dan Dikmas di seluruh pelosok Indonesia, juga untuk melahirkan GTK PAUD dan Dikmas teladan. Keteladanan akan berdampak pada kepercayaan diri seorang GTK PAUD dan Dikmas dalam memberikan layanan pendidikan yang lebih baik. Pada akhirnya akan meningkatkan harkat martabatnya. Dalam hal perlindungan, Direktorat GTK PAUD dan Dikmas juga senantiasa mengawal GTK PAUD dan Dikmas agar senantiasa merasa nyaman dan terlindungi dalam menjalankan tugasnya.

Tahun 2018, Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas memberikan penghargaan kepada GTK PAUD dan Dikmas melalui empat kegiatan, yakni 1) Pemilihan Guru TK, Kepala TK, dan Pengawas TK Berprestasi Tingkat Nasional; 2) Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi Tingkat Nasional; 3) Inovasi Pembelajaran dan Pengelolaan Satuan Pendidikan Dikmas; dan 4) Insan Peduli PAUD dan Dikmas.

Untuk GTK PAUD dan Dikmas yang bertugas di daerah khusus atau daerah 3T, ada penghargaan khusus yang penyelenggaranya dilakukan oleh Subdirektorat PKLK-SPILN. Penghargaan tersebut adalah Guru TK Berdedikasi dan Kepala TK Berdedikasi yang dilaksanakan berbarengan dengan ajang Pemilihan GTK Beprestasi dan Berdedikasi. Ada juga penghargaan kepada juara lomba Best Practices GTK PAUD Berdedikasi dan Lomba Best Practices GTK Dikmas Berdedikasi, yang juga diselenggarakan oleh Subdit PKLK-SPILN.

PEMILIHAN GTK PAUD BERPRESTASI DAN BERDEDIKASI

Kegiatan Pemilihan GTK PAUD Berprestasi dan Berdedikasi menjadi bagian dari kegiatan besar tahunan Pemilihan GTK Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Nasional. Dari GTK jenjang taman-kanak-kanak (PAUD formal), SD, SMP, dan SMA/SMK. Khusus kegiatan Pemilihan GTK PAUD Berprestasi dan Berdedikasi, kategori lombanya hanya lima macam, yakni untuk GTK Berprestasi, meliputi guru TK, kepala TK, dan pengawas TK. Sedangkan untuk GTK berdedikasi meliputi guru TK dan kepala TK.

Kategori pengawas TK berprestasi, serta guru TK dan kepala TK berdedikasi baru dilombakan tahun 2017 lalu. Di tahun-tahun sebelumnya, hanya guru TK dan kepala TK berprestasi yang dilombakan. Guru TK dan Kepala TK Berdedikasi diberikan kepada guru dan kepala TK yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa di daerah khusus, yakni daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T).

Pemilihan GTK PAUD Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Nasional diikuti wakil-wakil terbaik dari seluruh provinsi. Pemilihan GTK PAUD Berprestasi juga diselenggarakan secara bertingkat. Ada seleksi berlapis mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat nasional. Artinya, mereka yang berlaga di level nasional, adalah GTK PAUD terbaik, karena harus bersaing dengan GTK PAUD lain dari berbagai kabupaten/kota di provinsi masingmasing.

Tahun 2017 lalu, peserta guru TK berprestasi berasal dari 32 provinsi. Kepala TK berprestasi yang hadir dari 31 provinsi. Sedangkan pengawas TK berprestasi yang berlaga di tingkat nasional hanya dari 19 provinsi. Sebagian provinsi yang tak mengirimkan wakilnya, karena di provinsi tersebut masih belum ada pengawas TK mereka masih berstatus pengawas TK dan SD. Sebagian para pengawas TK dan SD harus memilih salah satu, apakah di ajang pemilihan pengawas SD berprestasi atau kepala TK berprestasi. Peserta guru dan kepala TK berdedikasi tahun 2017 lalu juga baru diikuti wakil dari 20 provinsi.

APRESIASI GTK PAUD DAN DIKMAS BERPRESTASI

Penghargaan juga dikembangkan untuk pendidik dan tenaga kependidikan pada jalur pendidikan nonformal, yakni meliputi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas. Penghargaan kepada PTK pendidikan nonformal baru terlaksana kali pertama di era Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal (Dit. PTK PNF) pada tahun 2007. Kala itu bernama

Jambore 1000 PTK PNF. Perubahan nomenklatur sejumlah satuan kerja pada organisasi Kemendikbud, juga diikuti perubahan nama kegiatan apresiasi PTK nonformal. Era Direktorat Pembinaan PTK PAUD Nonformal dan Informal (Dit. PPTK PAUDNI) mengubah nama kegiatan menjadi Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Nasional (2010). Sejak 2015, kegiatan di era Dit. PGTK PAUD dan Dikmas ini bernama Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi Nasional.

Kontingen Jawa Tengah sudah meraih enam kali juara umum, yakni tahun 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, dan 2013. Khusus tahun 2008, juara umum diraih bersama oleh Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Tim DI Yogyakarta sukses meraih empat kali juara umum yakni pada tahun 2008, 2009, 2015, 2016. Dominasi juara umum oleh Jateng dan Yogyakarta, berhasil diterobos oleh tim Jawa Barat yang meraih juara umum pada tahun 2014 dan 2017.

Jumlah matalomba juga semakin ditambah. Pada Jambore 1000 PTK-PNF dan Apresiasi PTK PAUDNI baru ada 14 jenis lomba perorangan dan kelompok. Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas pada 2015 dan 2016 mengangkat 16 jenis lomba perseorangan dan dua lomba kategori kelompok. Tahun 2018, bertambah satu lagi lomba perseorangan.

Kemeriahan gelaran Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2018 ini bakal berpindah ke Pontianak, Kalimantan Barat. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 8-14 Juli 2018. Jenis lomba yang diperebutkan juga bertambah menjadi 17 matalomba kategori perorangan dan 2 kategori kelompok. Mata lomba kategori perorangan meliputi: a) Guru KB/TPA/SPS; b) Pengelola KB/TPA/SPS; c) Instruktur Kursus Komputer, d) Instruktur Kursus Tata Kecantikan Rambut; e) Instruktur Kursus Tata Rias Pengantin; f) Instruktur Kursus Tata Busana; g) Instruktur Otomotif Teknik Sepeda Motor; h) Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP); i) Pamong Belajar pada SKB; j) Penilik; k) Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); I) Tutor Pendidikan Kesetaraan Paket A; m) Tutor Pendidikan Kesetaraan Paket B; n) Tutor Pendidikan Kesetaraan Paket C; o) Tutor Pendidikan Keaksaraan; p) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB); q) Pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Matalomba kategori kelompok meliputi Lomba Senam Kreasi Daerah GTK PAUD dan Dikmas dan Kelompok Paduan Suara GTK PAUD dan Dikmas.

"Untuk mengadakan mata lomba baru, harus memperhatikan dan mempertimbangkan sarana prasarananya. Misalnya lomba untuk instruktur otomotif teknik kendaraan ringan. Tentu tidak mudah menghadirkan mesin mobil di arena lomba," kata Suhatri.



Pada jalur formal, penghargaan diberikan kepada guru TK, kepala TK dan pengawas TK berprestasi tingkat nasional. Pesertanya adalah para juara I dari 34 provinsi. Mereka yang berlaga di tingkat nasional adalah hasil seleksi berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi. Seleksi berupa penilaian atas karya tulis yang dibuat peserta.

LOMBA KARYA INOVASI PEMBELAJARAN DAN Pengelolaan satuan pendidikan paud dan Dikmas

Mulai tahun 2017, Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas mengadakan lomba baru, yakni Lomba Karya Inovasi Pembelajaran dan Pengelolaan Satuan Pendidikan PAUD dan Dikmas (Inobel). Ada perbedaan mendasar pemberian penghargaan pada gelaran Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas dan Inobel. Peserta Apresiasi diwajibkan membuat tulisan tentang karya nyata mereka, sementara inobel lebih menitikberatkan pada inovasi dalam pembelajaran dan pengelolaan. "Inobel penonjolannya pada inovasi. Misalnya penggunaan media pembelajaran, atau cara pengelolaan. Kalau lomba Apresiasi, lebih menonjolkan karya nyata yang sudah dilakukan," kata Suhatri.

Peserta Inobel juga tidak melalui seleksi berjenjang. Peserta bisa langsung mengirimkan karya inovasi ke Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas. "Siapa saja bisa mengirim, terbuka, tidak melalui Dinas Pendidikan," katanya. Inobel digelar pada puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN).

"Perlunya menggelar Inobel pada PAUD dan Dikmas karena mereka yang lolos seleksi lomba Apresiasi, satu provinsi hanya diwakili satu peserta. Padahal sesungguhnya masih ada yang lain, kita buka kesempatan lain melalui Inobel ini," Suhatri menambahkan.







Matalomba pada Inobel 2018 baru empat kategori, yakni: a) Inovasi Pembelajaran PAUD; b) Inovasi Pembelajaran Dikmas; c) Inovasi Pengelolaan Satuan Pendidikan PAUD; d) Inovasi Pengelolaan Satuan Pendidikan Dikmas. Masing-masing matalomba diikuti 20 peserta finalis, sehingga total ada 80 peserta finalis Inobel.

INSAN PEDULI PAUD DAN DIKMAS

Penghargaan Insan Peduli diberikan kepada individu warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki pengalaman melakukan fungsi pendidik dan/atau tenaga kependidikan PAUD dan/ atau Dikmas selama lima tahun berturut-turut. "Insan peduli ini melakukan fungsi atau peran sebagai guru atau tendik PAUD atau Dikmas secara altruistik, dan belum tersentuh program Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas. Altruistik itu melakukan pengabdian tanpa pamrih. Misalnya ada wartawan yang peduli pendidikan, atau pekerja sosial yang sangat peduli pendidikan. Mereka bisa saja membuat lembaga pendidikan atau mengajar seperti yang dilakukan tentara yang mendedikasikan diri mengajar anak-anak di daerah tempat bertugas," kata Suhatri.

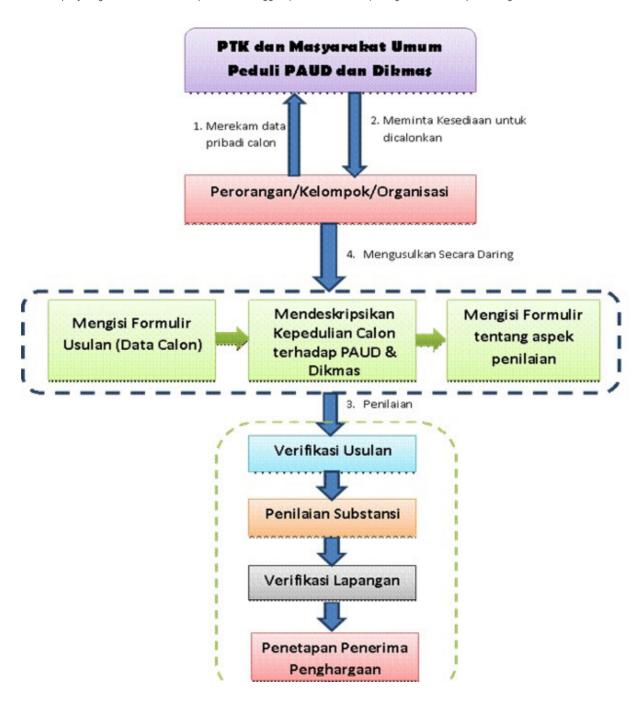
Kategorinya bisa pendidik atau pengelola PAUD saja, atau Dikmas saja, atau bisa juga keduanya, baik berperan sebagai pendidik dan pengelola. Penghargaan rencananya diberikan kepada 10 orang yang sudah melalui tahapan seleksi terhadap nominasi yang diusulkan masyarakat. "Mereka yang mendapat penghargaan tidak menggunakan juara-juara," katanya. Insan Peduli yang terpilih akan dihadirkan pada saat perayaan Hari Guru Nasional

Pengusul Insan Peduli adalah perorangan, kelompok, organisasi, asosiasi profesi pendidik, asosiasi profesi tenaga kependidikan, asosiasi profesi lainnya, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah daerah. Unsur atau kriteria individu yang dapat diusulkan meliputi:

- Inspiratif: memiliki karya dan aktivitas yang dapat memengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang sama;
- Inovatif: memunculkan sesuatu/cara baru;
- Pengabdian luar biasa: jujur, ikhlas berkorban, daya tahan/ persistensi;
- Membangun jejaring sumberdaya: tekun mencari dan memanfaatkan jejaring dari berbagi sumber, berhasil membangun jejaring; serta mengelola dan merawat jejaring tersebut:
- Berdampak, yakni dilihat dari sektor perluasan wilayah dampak dan peningkatan mutu. Misalnya peningkatan akses, angka melanjutkan, dan perubahan perilaku dan pola pikir.

"Persistensi adalah tindakan yang dilakukan secara sukarela dalam mencapai sesuatu yang diinginkan meskipun dilanda oleh berbagai hambatan, kesulitan, atau keputusasaan," katanya.

Proses penjaringan dilakukan setelah pedoman diunggah (bulan Maret 2018), dengan skema tahapan sebagai berikut.





PERLINDUNGAN GTK PAUD DIKMAS

Perlindungan kepada GTK PAUD Dikmas sudah memiliki payung hukum yakni Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan hukum, profesi, keselamatan kerja dan kesehatan kerja, dan hak atas kekayaan intelektual.

Ketika ada kejadian atau perkara menimpa PTK, banyak yang tidak tahu mengadu ke siapa. "Kami dari Direktorat memberikan saran, advokasi, pendampingan, sebagai penengah membantu menyelesaikan kedua pihak berperkara. Selain itu juga dapat berupa pemberian rujukan kepada GTK yang kurang paham penyelesaian hukum. Namun bukan berarti Direktorat mengambil alih kasus," kata Suhatri. "Namun kami belum membuat pedoman perlindungan GTK PAUD dan Dikmas."



CAPAIAN PROGRAM
SUBDIREKTORAT PENDIDIKAN KHUSUS,
PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS,
DAN SATUAN PENDIDIKAN
INDONESIA DI LUAR NEGERI
(PK, PKK, SPILN) 2017



Subdirektorat Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, dan Satuan Pendidikan Indonesia Luar Negeri (Subdit PK, PLK, dan SPILN) merupakan bagian dari struktur organisasi Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dit. PGTK PAUD dan Dikmas). Subdit PK, PLK, dan SPILN bertanggung jawab terhadap pembinaan GTK PAUD dan Dikmas yang menangani peserta didik berkebutuhan khusus dan yang bertugas di daerah khusus. Kedua ranah tersebut dikelola oleh Seksi Pendidikan Khusus (PK) dan Seksi Pendidikan Layanan Khusus dan Satuan Pendidikan Indonesia Luar Negeri (PLK dan SPILN).

Subdit ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, perencanaan kebutuhan, pengendalian formasi, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir, pemindahan, kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan satuan pendidikan Indonesia di luar negeri pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. penghargaan, dan perlindungan. (Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 165).

Selanjutnya pada Permendikbud tersebut Pasal 166 dikemukakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Subdit PK, PLK, dan SPILN menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan dan pengendalian formasi, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir, kesejahteraan, penghargaan dan pelindungan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan satuan pendidikan Indonesia di luar negeri pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- penyusunan bahan perencanaan kebutuhan dan pengendalian formasi, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir, pemindahan, kesejahteraan, penghargaan dan pelindungan guru dan pendidik lainnya pada pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan satuan pendidikan Indonesia di luar negeri pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan kebutuhan dan pengendalian formasi, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir, pemindahan, kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan satuan pendidikan Indonesia di luar negeri pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;











kegiatan pelatihan bagi guru paud inklusi daerah 3T di Jayapura, Papua

- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan kebutuhan dan pengendalian formasi, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir, pemindahan, kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan satuan pendidikan Indonesia di luar negeri pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
- pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang perencanaan kebutuhan dan pengendalian formasi, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir, pemindahan, kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan satuan pendidikan Indonesia di luar negeri pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat

Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus dan Satuan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri PAUD dan Dikmas (GTK PK, PLK, dan SPILN PAUD dan Dikmas) merupakan bagian dari saluran pembentukan insan Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan kompetitif, khususnya di bidang PAUD dan Dikmas. Sasaran binaan GTK PK, PLK, dan SPILN adalah peserta didik PAUD dan Dikmas yang teridentifikasi menyandang kebutuhan khusus dan/atau peserta didik PAUD dan Dikmas yang berdomisili di daerah 3T, di lingkungan masyarakat adat terpencil, mengalami bencana, dan tidak mampu secara ekonomi memperoleh akses layanan pendidikan. Peserta didik PK dapat dilayani di satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan umum (inklusif). Berdasarkan Data Dapodik (2015), jumlah lembaga PAUD inklusif di Indonesia sebanyak 4.676 lembaga.



SASARAN PEMBINAAN GTK PK, PLK, SPILN PAUD DAN Dikmas 2017

Pembinaan GTK PAUD dan Dikmas menekankan pada tiga hal utama, yakni peningkatan kompetensi, pengembangan karier dan pemberian kesejahteraan dan penghargaan. Pada Subdirektorat PK, PLK, dan SPILN untuk melancarkan program terlebih dahulu diawali dengan melihat data sasaran yang terdaftar/terverifikasi. Data tersebut menjadi acuan agar pembinaan menjadi tepat sasaran, efektif dan efisien.

"Sesuai Peraturan Presiden No 31 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2015-2019. Di dalam Perpres tersebut dijelaskan, bahwa daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Sedangkan daerah terluar adalah daerah yang mengalami keterbatasan akses layanan pembangunan, daerah Terdepan daerah yang langsung berbatasan dengan negara lain, mencakup kawasan perbatasan darat dan kawasan laut serta kawasan daratan pesisir," jelas Drs. Nasruddin, Kasubdit PK, PLK, dan SPILN, Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas.

Nasruddin juga mengatakan, bahwa daerah tertinggal, terdepan dan terluar selanjutnya diistilahkan sebagai daerah 3T. Daerah 3T merupakan daerah yang termasuk kategori tertinggal secara sosial ekonomi, terluar atau terpencil sehingga mengalami keterbatasan akses layanan pembangunan termasuk pendidikan, dan terdepan dalam arti daerah yang langsung berbatasan dengan negara lain. Berdasarkan Perpres No. 31 Tahun 2015 telah ditetapkan jumlah daerah 3T sebanyak 143 kabupaten yang tersebar di 27 provinsi. Daerah 3T tersebut terdiri dari 122 kabupaten tertinggal dan 43 kabupaten terluar/terdepan.

Jenis GTK PK, PLK, dan SPILN yang menjadi prioritas peningkatan kompetensi oleh Subdit PK, PLK, dan SPILN adalah instruktur pada lembaga-lembaga kursus dan pelatihan, serta guru-guru PAUD. Jumlah instruktur pada lembaga kursus dan pelatihan. "Jumlah instruktur kursus pada daerah tertinggal/terpencil tercatat sebanyak 2.449 instruktur yang tersebar di 967 LKP. Jumlah instruktur pada daerah terdepan/terluar tercatat berjumlah 1696 orang yang tersebar di 575 LKP. Jumlah total instruktur sebanyak 4.145 dan jumlah LKP sebanyak 1.542 yang tersebar di 143 kabupaten. Rincian jumlah LKP dan instruktur dapat dilihat pada tabel berikut ini," papar Nasruddin.

Tabel sebaran instruktur pada LKP di daerah 3T

BEKAD DV.	TA INSTRU	IKTIIR	No	Propinsi	Kab/Kota	Terper	ıcil	Terdepan dan	Terluar	Jumlah	Jumlah
	AY TE HAS		NU	Propinsi	Kad/ Kuta	Instruktur	LKP	Instruktur	LKP	Instruktur	LKP
			- 1	NTB	8	657	238			657	238
	DI PRIORIT		2	NTT	19	103	48	539	226	642	274
PENINGKAT	'AN KOMPE	ETENSI	3	Kepri	5			513	102	513	102
			4	Jawa Timur	4	417	134			417	134
			5	Banten	2	341	115			341	115
			6	Sulawesi Tengah	9	271	142	N.		271	142
			7	Riau	6			211	92	211	92
LKP	967		8	Kalimantan Barat	9	63	29	82	49	145	78
MOTO			9	Kalimantan Selatan	1	139	22			139	22
INSTR	2.449	\ \	10	Sumatera Utara	5	24	- 11	96	25	120	36
LKP	575	1	- 11	Sulawesi Barat	2	97	44			97	44
LKP	3/3		12	Aceh	3	10	8	78	24	88	32
INSTR	1.696		13	Papua	27	5	4	78	26	83	30
			14	Sulawesi Tenggara	3	61	25			61	25
TOTAL	TOTAL		15	Maluku Utara	6	47	22	12	5	59	27
LVD	15/0		16	Kalimantan Timur	2			58	17	58	17
LKP	1.542	, , ,	17	Maluku	8	42	27	10	2	52	29
INSTR	4.145		18	Sumatera Selatan	2	47	31			47	31
INDIK	4.140		19	Sulawesi Selatan	1	43	28			43	28
			20	Lampung	2	28	14			28	14
			21	Sulawesi Utara	2			18	6	18	6
			22	Sumatera Barat	3	16	4			16	4
			23	Papua Barat	7	16	6			16	6
			24	Kalimantan Tengah	1	15	12			15	12
			25	Gorontalo	3	6	2			6	2
			26	Kalimantan Utara	2					. !	- 1
			27	Benokulu	1 2		9				

(Sumber data: Subdit PK, PLK, dan SPILN tahun 2017)

143 2.449 967 1696

575 4.145 1.542



(Tampak salah satu lembaga PAUD di Sungai Bajau, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.)

Sedangkan jumlah lembaga dan guru PAUD inklusif yang yang tersebar di 34 provinsi di 382 kabupaten berjumlah 6.022 lembaga dengan guru PAUD berjumlah 27.210 orang. Rincian data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel sebaran lembaga dan guru PAUD inklusif di daerah 3T



(Sumber data: Subdit PK,PLK dan SPILN)

POLA PEMBINAAN GTK PK,PLK, DAN SPILN GTK PAUD Dan Dikmas

Pola pembinaan yang dilakukan pada GTK PK, PLK, dan SPILN dilakukan berdasarkan perencanaan kebutuhan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, penilaian kinerja dan pengembangan karier, serta pemberian kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan.

Pada kegiatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi acuan data yang digunakan adalah Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Pada peningkatan kualifikasi dilaksanakan melalui bantuan pendidikan dan konversi hasil diklat pada lembaga yang diakui. Sedangkan peningkatan kompetensi dilakukan melalui uji kompetensi guru (UKG). Dari hasil UKG terlihat capaian kompetensi yang dimiliki setiap GTK, sehingga memudahkan dalam membuat peta mutu. Tindak lanjut dari UKG bagi yang belum memenuhi standar minimal maka diharuskan mengikuti diklat, magang, atau kursus dengan alokasi waktu yang telah ditentukan.



Pada penilaian kinerja guru, hasil PKG digunakan sebagai dasar dalam proses sertifikasi pendidik dan sertifikasi kompetensi. Sertifikasi tersebut digunakan untuk mendapatkan Tunjangan Profesi Pendidik (TPG). Sedangkan pada penilaian kinerja dan pengembangan karier, pembinaan dilakukan untuk penyesuaian/penyetaraan/inpassing serta untuk kenaikan golongan/pangkat.

Pemberian tunjangan dan kesejahteraan dan perlindungan diberikan dalam rangka menaikkan martabat dan derajat GTK PK, PLK, dan SPIL di masyarakat. Untuk tunjangan diberikan melalui Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan (Subdit. Kesharlindung). Sedangkan penghargaan diberikan oleh Subdit. PK, PLK, dan SPILN melalui seleksi. Di antaranya adalah seleksi GTK PAUD dan Dikmas melalui pengalaman terbaik (best practice) yang pelaksanaannya bersamaan dengan Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi dan Berdedikasi. Peserta pada seleksi ini adalah GTK PAUD dan Dikmas yang mengabdi di daerah 3T pada lembaga Satuan PAUD Sejenis (SPS), Kelompok Belajar (KB), dan Tempat Penitipan Anak (TPA). Sedangkan yang diseleksi melalui pada pemilihan GTK TK Berdedikasi adalah para GTK PAUD pada satuan pendidikan formal (Taman Kanak-Kanak).

Pola pembinaan GTK PK,PLK, dan SPILN



STRATEGI PEMBINAAN GTK PK. PLK. DAN SPILN PAUD TAHUN 2017

Program pembinaan Subdit PK, PLK, dan SPILN dilaksanakan melalui dua mekanisme penganggaran, yaitu swakelola dan bantuan pemerintah (bapem). Pada mekanisme swakelola, kegiatan diselenggarakan dan dipertanggungjawabkan secara langsung oleh Subdit PK, PLK, dan SPILN, baik teknis maupun keuangan. Sedangkan pada mekanisme penganggaran bantuan pemerintah, Subdit PK, PLK, dan SPILN menjalin kerja sama dengan organisasi mitra yang bergerak di bidang pembinaan GTK PK, PLK, dan SPILN PAUD dan Dikmas. Pada mekanisme ini, Subdit PK, PLK, dan SPILN menyalurkan dana bantuan kepada organisasi mitra yang dinilai layak. Kedudukan Subdit PK, PLK, dan SPILN di sini sebagai penyalur dana sekaligus pembina dan pengendali mutu program.

Mitra Subdit PK, PLK, dan SPILN meliputi, birokrasi, akademisi, dan praktisi. Jalinan kemitraan tersebut ditempuh untuk mempercepat pencapaiaan target yang telah ditetapkan, memperluas akses bagi GTK PK, PLK, dan SPILN PAUD dan Dikmas dalam memperoleh pembinaan GTK PK, PLK, dan SPILN, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung program-program pembinaan GTK dimaksud. Dengan demikian, proses pembinaan GTK PK, PLK, dan SPILN PAUD dan Dikmas dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Pada tahun 2017, Subdit PK, PLK, dan SPILN memberikan bantuan pemerintah kepada Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) dan Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI atau dikenal dengan IGTKI-PGRI). Dana tersebut untuk membiayai tiga jenis pendidikan dan pelatihan (diklat), yaitu: Diklat PAUD Inklusif bagi GTK PAUD, Diklat Guru PAUD Tingkat Dasar Daerah 3T, dan Diklat Pengelola PAUD Daerah 3T.



Subdit PK, PLK, dan SPILN juga memberikan penghargaan bagi GTK PAUD dan Dikmas berdedikasi pada tahun 2017. Penghargaan tersebut diberikan melalui proses seleksi administrasi, naskah, dan presentasi. Penilaian dilakukan secara transparan dan obyektif oleh tim penilai dari unsur birokrasi, akademisi, dan praktisi.

CAPAIAN SUBDIT PK, PLK, DAN SPILN TAHUN 2017

Program Subdit PK, PLK, dan SPILN Tahun 2017 secara garis besar meliputi, Rencana Kebutuhan PK, PLK, dan SPILN, Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB), Pelaksanaan PKB, Pelaksanaan Pemberian Penghargaan; dan Analisis Pemenuhan Kebutuhan Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan. Program tersebut diselenggarakan melalui mekanisme penganggaran swakelola dan bantuan pemerintah.

Pada kegiatan perencanaan kebutuhan, kegiatan dilakukan melalui *Review* Pedoman Perencanaan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD di Daerah 3 T. Kegiatan ini diselenggarakan 5 tempat yang salah satunya berupa kegiatan *Review* Bahan Ajar Bimtek PAUD Inklusif. Kemudian dilaksanakan pula koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan PKB bagi bagi GTK PAUD di Daerah 3T. Kegiatan ini berlangsung di dua tempat dengan mengundang kurang lebih 170 peserta.



Subdirektorat PK, PLK, dan SPILN juga telah menggulirkan bantuan pemerintah kepada mitra di daerah untuk menyelenggarakan diklat peningkatan kompetensi bagi GTK PAUD daerah 3T. Kegiatan ini berupa diklat dasar bagi guru PAUD, diklat pengelola PAUD dan diklat guru PAUD inklusif. Kuota yang tersedia pada tiap jenis diklat sebanyak 20 paket untuk diklat dasar guru PAUD dan pengelola PAUD, serta 22 paket untuk diklat guru PAUD inklusif. Tiap diklat ditargetkan menampung maksimal 40 peserta.

Untuk memastikan diklat berjalan dengan baik serta sesuai petunjuk, selalu dihadiri staf Subdirektorat PK, PLK, dan SPILN. Petugas dari pusat tersebut selain berperan mengawasi jalannya diklat, juga memastikan kehadiran jumlah peserta sesuai pedoman, juga memastikan kualifikasi dan kompetensi pemateri yang dihadirkan. Dari kegiatan diklat peningkatan kompetensi ini, total peserta yang telah tersentuh di tahun 2017 sebanyak 2640 orang.



Pada pelaksanaan kegiatan PKB, beragam kegiatan telah dilaksanakan sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

NAMA KEGIATAN PKB	JUMLAH PESERTA	TEMPAT/WAKTU
Strategi Pembinaan GTK PK, PLK dan SPILN PAUD dan Dikmas	72 orang	Hotel Sahira Bogor, 20 - 22 April 2017
Bimtek Peningkatan Kompetensi Instruktur Kursus di Daerah 3 T Angkt I	28 orang	Hotel Horison Yogyakarta, 29 Mei - 2 Juni 2017
Bimtek Peningkatan Kompetensi Instruktur Kursus di Daerah 3 T Angkt II	37 orang	Hotel Horison Yogyakarta, 29 Mei - 2 Juni 2017
Bimtek TOT Diklat Tingkat Dasar di Daerah 3T	60 orang	Hotel Sahira Bogor, 12 - 17 Juni 2017
Seleksi Naskah Best Practise GTK PAUD dan Dikmas dan Naskah Pemilihan GTK PAUD Berdedikasi Tk. Nasional	6 orang	Hotel Sahira Bogor, 12 - 17 Juni 2017
Bimtek TOT Diklat bagi Pengelola PAUD di Daerah 3 T	60 orang	Hotel Royal Heritage Solo, 19 - 24 Juli 2017
Bimtek TOT Diklat Dasar bagi GTK PAUD di Daerah Perbatasan	40 orang	Hotel Mercure Pontianak, 11 - 15 September 2017
Bimtek TOT Diklat Mendongeng bagi Guru PAUD di Daerah 3 T	26 orang	Hotel Royal Bogor, 17 - 24 Oktober 2017
Bimtek TOT Diklat Pengembangan Kepribadian bagi Guru PAUD Daerah 3 T	26 orang	Hotel Royal Bogor, 17 - 24 Oktober 2017
Program Peningkatan Kompetensi bagi GTK PAUD di Daerah 3 T	73 orang	62 lokasi, Sept - Nov 2017
BImtek TOT Diklat PAUD Inklusif bagi GTK PAUD	66 orang	Hotel Royal Padjajaran Bogor, 2 – 7 Agustus 2017

Selain itu, telah dilaksanakan pula kegiatan Analisis Pemenuhan Kebutuhan dan Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan, serta berlangsung di dua tempat. Kegiatan ini terlihat pada tabel berikut.

NAMA KEGIATAN	SASARAN	TEMPAT DAN WAKTU	
Penyusunan Strategi Program PK, PLK dan SPILN Tahun 2018	18 orang	Hotel Sahira Bogor, 11 - 13 Desember 2017	
Evaluasi Pelaksanaan Bimtek <i>Training of Trainer</i> (TOT) GTK PAUD dan Dikmas	128 orang	Hotel Century Jakarta, 23 - 26 November 2017	

Pada program pemberian penghargaan, Subdit PK,PLK dan SPILN juga telah melaksanakan dalam berbagai bentuk, antara lain:

- Best Practise Pendidik PAUD dan Dikmas di Daerah 3T (terintegrasi dalam kegiatan Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi
- Pemberian Penghargaan bagi Guru TK dan Kepala TK Berdedikasi dari Daerah 3T (terintegrasi dalam kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Guru Berprestasi).

Dua kegiatan ini telah menghasilkan GTK PAUD dan Dikmas daerah 3T terbaik. Diharapkan mereka menjadi teladan, panutan serta pionir bagi GTK PAUD dan Dikmas daerah 3T lainnya.

Daftar Pemenang Program Pemberian Penghargaan bagi GTK PAUD dan Dikmas Berdedikasi Tahun 2017

NO	KEGIATAN DAN JENIS LOMBA	PEMENANG	ASAL PROVINSI				
A.	Best Practise Pendidik PAUD dan Dikmas di Daerah 3T						
1.	Pendidik Dikmas	 Wijaya, S.Pd Syamsudin Ya'kub Ningsih Hanapi, S.Pd, M.Pd 	Kalimantan Barat Nusa Tenggara Barat Gorontalo				
2.	Pendidik PAUD	 Yuliani Lase, S.Pd Fachruddin, S.Pd Pdt. Martha Ari Molla, S.Si 	Sumatera Utara Banten Nusa Tenggara Timur				
В.	Pemberian Penghargaan bagi Guru TK dan Kepala TK Berdedikasi dari Daerah 3T						
1.	Guru TK	 Rodatul Jannah, S,Pd, Gr. Putiha, S.Pd Martha Ewi, S.Pd 	Nusa Tenggara Timur Papua Barat Maluku Utara				
2.	Kepala TK	 Muzayanah Dinensi Rs. Saidi Siti Mudrikah 	Sumatera Selatan Gorontalo Kalimantan Utara				

Program Penyusunan Rencana Kebutuhan PK, PLK, dan SPILN Tahun 2017 juga menghasilkan *output* berupa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) untuk mendukung penyelenggaraan program peningkatan kompetensi dan pelaksanaan pemberian penghargaan GTK PK, PLK, dan SPILN PAUD dan Dikmas. Penyusunan rencana kebutuhan ini melibatkan para pakar dari berbagai bidang keahlian yang berasal dari unsur birokrasi (unit internal Ditjen GTK, unit eksternal Ditjen GTK yang terkait, UPT di lingkungan Ditjen GTK, UPT/D PAUD dan Dikmas), akademisi (yang relevan), dan praktisi (organisasi mitra/independen/asosiasi profesi yang relevan).





Terdapat 15 produk NSPK yang telah dihasilkan Subdirektorat PK, PLK, dan SPILN yang terdiri dari:

- Pedoman Perencanaan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD di Daerah 3 T
- Pedoman Perencanaan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Masyarakat di Daerah 3T
- Pedoman Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Instruktur Kursus di Daerah 3T
- Pedoman Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tutor Kesetaraan di Daerah 3T
- Pedoman Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi GTK PAUD Pada SPILN
- Pedoman Pemilihan Guru dan Kepala Taman Kanak-Kanak Berdedikasi di Daerah 3 T
- Pedoman Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Pengelola Kursus di Daerah 3 T
- Pedoman Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Instruktur Kursus pada Satuan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri
- Pedoman Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tutor Kesetaraan pada Satuan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri
- Pedoman Penilaian dalam rangka Pemilihan Guru dan Kepala TK Berdedikasi di Daerah 3 T

Direktur PGTK PAUD dan Dikmas didampingi Kasubdit PK, PLK, dan SPILN berfoto bersama para guru TK daerah 3T dalam pemilihan guru TK daerah 3T berdedikasi tahun 2017.





- Pedoman Best Practice Pendidik PAUD dan Dikmas di Daerah 3 T
- Pedoman Perencanaan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus PAUD
- · Pedoman Perencanaan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus Dikmas
- · Pedoman Penyelenggaraan Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru PAUD Inklusif
- · Bahan Ajar Bimtek PAUD Inklusif

Capaian program yang telah dilaksanakan Subdit PK, PLK, dan SPILN di tahun 2017 menjadi pijakan untuk melaksanakan program di tahun 2018 dengan lebih baik. Subdit PK, PLK, dan SPILN menyadari, bahwa untuk mengawal GTK PAUD dan Dikmas di daerah 3T membutuhkan perjuangan yang tidak singkatk. Diperlukan kontinuitas yang terus-menerus. Semoga GTK PK, PLK, dan SPILN semakin maju dalam peradaban di tahun-tahun mendatang.